

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* DAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* TERHADAP *EFFECTIVE TAX  
RATE* PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR  
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR  
DI BEI TAHUN 2021-2024**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Sarjana Terapan pada Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**Farica Salma Arbaretza**  
40011422650269

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN  
AKUNTANSI PERPAJAKAN  
DEPARTEMEN BISNIS DAN KEUANGAN  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

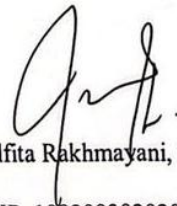
**2026**

## PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama penyusun : Farica Salma Arbaretza  
Nomor Induk Mahasiswa : 40011422650269  
Fakultas : Sekolah Vokasi  
Program Studi : Diploma IV Akuntansi Perpajakan  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan  
*Good Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax  
Rate* pada Perusahaan Subsektor Makanan dan  
Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024

Semarang, 2 Juli 2026

Dosen Pembimbing



Alfita Rakhmayani, S.E., M.Ak.

NIP. 199209302020122017

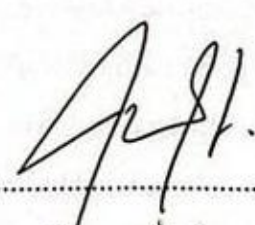
## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Farica Salma Arbaretza  
Nomor Induk Mahasiswa : 40011422650269  
Fakultas : Sekolah Vokasi  
Program Studi : Diploma IV Akuntansi Perpajakan  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan  
*Good Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024

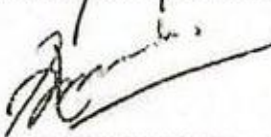
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

### Tim Penguji

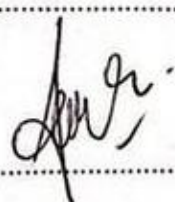
1. Alfita Rakhmayani, S.E., M.Ak.

(..........)

2. Diva Ayu Imanda Sari, S.E., M.Ak.

(..........)

3. Made Laksmi Sena Hartini, S.E. Ak., M.Ak.

(..........)

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Farica Salma Arbaretza, menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul: Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024, yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 2 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Farica Salma Arbaretza

NIM 40011422650269

## ABSTRAK

Penelitian ini punya tujuan guna menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Objek penelitian ialah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Bloomberg Terminal, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan. Sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dan menghasilkan 24 perusahaan dengan 96 observasi dalam *balanced panel*. ETR ditempatkan sebagai variabel dependen dan diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. CSR sebagai variabel independen diukur menggunakan *GRI Disclosure Index*, sedangkan GCG diukur menggunakan indeks komposit yang dibentuk dari proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. *Return on Assets* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) dipergunakan sebagai variabel kontrol. Analisis data dilaksanakan menggunakan regresi data panel dengan model akhir *Panel Estimated Generalized Least Squares* berbasis *cross-section weights*. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata ETR sebesar 22,32162%, relatif mendekati tarif umum PPh Badan 22%. Secara parsial, CSR memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR, sedangkan GCG tidak memberi pengaruh signifikan terhadap ETR. ROA sebagai variabel kontrol memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR, sementara DER tidak memberi pengaruh signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan CSR dan profitabilitas berkaitan dengan penurunan ETR. Sementara itu, mekanisme GCG yang diukur melalui indeks komposit serta struktur pendanaan perusahaan belum terbukti memengaruhi variasi ETR pada perusahaan subsektor makanan dan minuman saat periode penelitian.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, *Effective Tax Rate*, profitabilitas, perusahaan makanan dan minuman.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Corporate Governance (GCG) on the Effective Tax Rate (ETR). The research objects consist of food and beverage subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021-2024 period. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from Bloomberg Terminal, annual reports, and corporate sustainability reports. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 24 companies and 96 observations within a balanced panel structure. ETR is positioned as the dependent variable and is measured by comparing income tax expense with income before tax. CSR, as an independent variable, is measured using the GRI Disclosure Index, while GCG is measured using a composite index consisting of the proportion of independent commissioners, audit committee, and institutional ownership. Return on Assets (ROA) and Debt to Equity Ratio (DER) are included as control variables. The data are analyzed using panel data regression, with the final model employing Panel Estimated Generalized Least Squares based on cross-section weights. The results show that the average ETR is 22.32162%, which is relatively close to the statutory corporate income tax rate of 22%. Partially, CSR has a negative and significant effect on ETR, whereas GCG has no significant effect on ETR. ROA, as a control variable, has a negative and significant effect on ETR, while DER has no significant effect. These findings indicate that greater CSR disclosure and higher profitability are associated with a lower ETR. Meanwhile, GCG mechanisms measured through a composite index and corporate financing structure have not been proven to affect ETR variations among food and beverage subsector companies during the research period.*

*Keywords: Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Effective Tax Rate, profitability, food and beverage companies.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridho, rahmat, dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Apip, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
4. Alfita Rakhmayani, S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam pelaksanaan serta penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Sutedjo dan Mama Arie Indah, yang menjadi rumah paling teduh dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang selalu menguatkan, serta pengorbanan yang mungkin tidak selalu terucap, tetapi selalu penulis rasakan. Setiap pencapaian dalam perjalanan perkuliahan hingga tersusunnya tugas akhir ini tidak lepas dari cinta, kesabaran, dan keyakinan Bapak dan Mama terhadap penulis.
7. Keluarga penulis, terutama nenek tercinta dan adik tersayang, Adam Edgar, yang kehadirannya menjadi sumber kehangatan dan semangat bagi penulis. Terima kasih atas doa-doa sederhana yang begitu berarti, perhatian yang tulus,

serta dukungan yang membuat penulis merasa tidak pernah berjalan sendirian selama proses penyusunan tugas akhir ini.

8. Frizar Aditya Ernesta, yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, perhatian, serta menjadi tempat berbagi cerita bagi penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Kesabaran, waktu, dan motivasi yang diberikan menjadi bagian penting yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
9. Teman-teman terdekat penulis selama masa perkuliahan, Manda, Thia, Nadea, Nindi, Savina, Dea, dan Ellen, yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan, dan kebersamaan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis, menemani dalam suka maupun duka, serta memberikan warna dan kenangan indah hingga proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Seluruh teman-teman Program Studi S.Tr. Akuntansi Perpajakan angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis berharap ucapan ini dapat mewakili rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama penulis menyusun tugas akhir. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga penelitian ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 2 Juli 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	14
1.1    Latar Belakang .....	14
1.2    Rumusan Masalah .....	23
1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	25
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	25
1.3.2    Kegunaan Penelitian.....	25
1.4    Sistematika Penulisan .....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1    Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	30
2.1.1    Teori Keagenan (Agency Theory) .....	30
2.1.2    Teori Legitimasi .....	34
2.1.3    Effective Tax Rate (ETR) .....	37
2.1.4    Corporate Social Responsibility (CSR) .....	41
2.1.5    Good Corporate Governance (GCG) .....	45
2.1.6    Leverage.....	49
2.1.7    Return on Assets (ROA) .....	52
2.1.8    Karakteristik sektor Makanan dan Minuman.....	53
2.2    Penelitian Terdahulu .....	56
2.3    Kerangka Pemikiran.....	62
2.4    Hipotesis.....	65
2.4.1    Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Effective Tax Rate (ETR) .....	65
2.3.2    Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Effective Tax Rate (ETR) .....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
3.1    Populasi & Sampel.....	71

3.1.1	Populasi.....	71
3.1.2	Sampel.....	73
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	73
3.2.1	Variabel Dependen: Effective Tax Rate (ETR).....	76
3.2.2	Variabel Independen: Corporate Social Responsibility (CSR).....	77
3.2.3	Variabel Independen: Good Corporate Governance (GCG).....	81
3.2.4	Variabel Kontrol: Leverage (DER).....	84
3.2.5	Variabel Kontrol: Profitabilitas (ROA).....	85
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	87
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	88
3.5	Teknik Analisis Data.....	89
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif.....	89
3.5.2	Analisis Regresi Data Panel.....	90
3.5.3	Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi.....	94
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		96
4.1	Gambaran Umum.....	96
4.2	Analisis Statistika Deskriptif.....	98
4.3	Analisis Data.....	100
4.3.1	Uji Asumsi Klasik.....	101
4.3.2	Analisis Regresi Data Panel.....	106
4.3.3	Uji Hipotesis.....	109
4.4	Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	113
4.4.1	Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Effective Tax Rate (ETR).....	113
4.4.2	Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Effective Tax Rate (ETR).....	116
4.4.3	Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Effective Tax Rate (ETR).....	118
4.4.4	Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Effective Tax Rate (ETR).....	119
BAB V PENUTUP.....		122
5.1	Kesimpulan.....	122
5.2	Keterbatasan dan Saran.....	123
5.2.1	Keterbatasan Penelitian.....	123
5.2.2	Saran.....	124

5.3	Implikasi.....	125
5.3.1	Implikasi Teoritis .....	125
5.3.2	Implikasi Praktis .....	126
DAFTAR PUSTAKA .....		128

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	58
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian .....	95
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistika Deskriptif .....	96
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Residual .....	100
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	102
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	103
Tabel 4.6 Hasil Regresi Final Panel EGLS (Cross-section Weights) .....	105
Tabel 4.7 Hasil Uji F .....	107
Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi .....	108
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji t .....	109

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Model Konseptual .....	64
-----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Penelitian .....	131
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	130
Lampiran 3 Hasil Uji Analisis Statistika Deskriptif .....	137
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas .....	138
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	138
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	138
Lampiran 7 Hasil Regresi Awal Panel Least Squares.....	139
Lampiran 8 Hasil Regresi Final Panel EGLS Cross-section Weights .....	140

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak ialah satu di antara sejumlah unsur utama dalam pengelolaan keuangan negara. Pajak tidak hanya berperan dalam menjaga kondisi fiskal, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2024 dan laporan GoodStats yang dipublikasikan pada tahun 2024, sekitar 82,4% pendapatan negara pada tahun tersebut berasal dari pajak. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwasanya pemasukan negara masih teramat bergantung pada sektor pajak. Oleh karena itu, upaya menjaga penerimaan pajak perlu diarahkan tidak hanya sebatas pada pencapaian target tahunan, namun juga pada kualitas, stabilitas, dan keberlanjutan penerimaan dalam jangka panjang.

Direktorat Jenderal Pajak (2024) menjelaskan bahwa kinerja penerimaan pajak nasional dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang positif, meskipun tetap menghadapi tantangan. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak melampaui target selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2021-2023. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi, perbaikan administrasi perpajakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024) juga menunjukkan bahwa penguatan penerimaan tetap perlu dijaga, terutama karena target penerimaan

pajak terus meningkat dan basis pajak korporasi masih menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi formal. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya membutuhkan peningkatan penerimaan secara nominal, tetapi juga penguatan kualitas kepatuhan wajib pajak badan.

Peran sektor korporasi, khususnya wajib pajak badan, dalam perekonomian menjelaskan mengapa kelompok ini menjadi perhatian penting dalam kebijakan perpajakan. Korporasi berkontribusi melalui kegiatan produksi, distribusi, inovasi, penciptaan nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja, sehingga aktivitasnya menjadi bagian penting dari basis pajak negara. Namun, dari sisi perusahaan, pajak sering dinilai sebagai beban yang bisa memotong laba bersih. Kondisi tersebut berkaitan dengan teori keagenan karena keputusan perpajakan perusahaan umumnya dikelola oleh manajemen selaku pihak yang melaksanakan operasional perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya pemisahan antara pemilik serta manajemen dapat menghadirkan konflik kepentingan karena manajemen tidak selalu berperilaku sepenuhnya sesuai dengan kepentingan pemilik. Pada konteks pajak, konflik tersebut bisa muncul ketika manajemen memiliki dorongan untuk mengelola beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak atau memenuhi target kinerja tertentu. Oleh karena itu, Alkausar dkk. (2020) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dipahami melalui perspektif teori keagenan karena keputusan pajak perusahaan tidak sebatas berkaitan dengan kepatuhan, namun turut dengan kepentingan manajerial dalam mengatur kinerja perusahaan.

Perubahan cara pandang terhadap pajak menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak lagi hanya dipahami sebagai kewajiban administratif atau biaya perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari manajemen risiko. OECD (2024) menjelaskan bahwa administrasi pajak modern menekankan pentingnya pengelolaan risiko kepatuhan melalui proses identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu, *International Monetary Fund* (IMF) (2024) menjelaskan bahwa analitik dalam administrasi pajak dapat digunakan untuk mendukung *compliance risk management* agar pengawasan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif. Bagi emiten yang tercantum di Bursa Efek Indonesia, kepatuhan pajak yang baik dapat menekan potensi sanksi dan sengketa, sekaligus menjaga kredibilitas pelaporan serta kualitas tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap pajak perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pajak yang dibayarkan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kewajaran beban pajak dibandingkan laba, konsistensi dari waktu ke waktu, dan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

*Effective Tax Rate* (ETR) ialah satu di antara sejumlah indikator yang banyak digunakan mengukur besarnya beban pajak efektif perusahaan. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR dapat digunakan untuk membandingkan beban pajak efektif antarperusahaan dan antarperiode. Saat riset ini, *Effective Tax Rate* (ETR) diposisikan sebagai variabel dependen yang merepresentasikan beban pajak efektif perusahaan, bukan sebagai ukuran langsung kepatuhan pajak maupun *tax avoidance*. ETR digunakan untuk menggambarkan proporsi beban pajak terhadap

laba sebelum pajak sebagai bentuk pengukuran posisi pajak perusahaan secara relatif terhadap tarif pajak yang berlaku.

ETR perlu ditafsirkan secara hati-hati karena tidak sebatas terpengaruh oleh keputusan pajak, namun turut oleh faktor nonpajak contohnya karakteristik perusahaan, perbedaan akuntansi dan fiskal, insentif pajak, serta kondisi operasional perusahaan. Christensen dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR rendah tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan, sedangkan Schwab dkk. (2022) menegaskan bahwa ETR dapat dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak. Dalam konteks Indonesia, Republik Indonesia (2021) melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif umum PPh Badan sebesar 22% mulai Tahun Pajak 2022. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai benchmark untuk melihat posisi relatif beban pajak perusahaan, bukan untuk menilai tingkat kepatuhan secara langsung.

Fenomena *Effective Tax Rate* (ETR) dalam penelitian ini terlihat dari adanya perbedaan beban pajak efektif antarperusahaan meskipun perusahaan berada dalam subsektor yang sama dan menghadapi tarif pajak badan yang sama. ETR digunakan untuk membandingkan beban pajak efektif antarperusahaan maupun antarperiode (Drake dkk., 2020). Menurut Republik Indonesia (2021), tarif umum PPh Badan di Indonesia ditetapkan sebesar 22% mulai Tahun Pajak 2022, sehingga tarif tersebut dapat digunakan sebagai pembanding deskriptif terhadap tingkat ETR perusahaan. Namun, menurut Schwab dkk. (2022), ETR dapat dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak, seperti perbedaan perlakuan akuntansi

dan fiskal, insentif pajak, karakteristik operasional, profitabilitas, struktur pendanaan, serta kebijakan manajemen perusahaan. Selain itu, Christensen dkk. (2022) menjelaskan bahwa ETR yang rendah tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, ETR tidak dapat langsung digunakan untuk menyatakan perusahaan patuh atau tidak patuh, tetapi lebih tepat digunakan sebagai indikator untuk melihat posisi beban pajak efektif perusahaan secara relatif.

Pada konteks ini, variasi ETR antar perusahaan dapat dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan, termasuk kebijakan manajemen, struktur tata kelola, juga tingkat tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperkirakan bisa memengaruhi ETR melalui peningkatan tekanan reputasi dan tuntutan transparansi dari pemilik kepentingan, yang nantinya bisa membentuk kebijakan perpajakan yang lebih konservatif. Sementara itu, *Good Corporate Governance* (GCG) punya peran sebagai mekanisme pengawasan internal yang dapat membatasi ruang manajemen dalam melakukan pengelolaan beban pajak secara oportunistik. Dengan demikian, CSR dan GCG diasumsikan memiliki keterkaitan dengan variasi ETR perusahaan melalui mekanisme legitimasi eksternal dan pengawasan internal.

Sejumlah studi pada emiten BEI menunjukkan adanya variasi ETR atau CETR yang cukup besar antarperusahaan. Andriani dan Sinabutar (2020) menemukan bahwa terdapat kelompok perusahaan dengan ETR rendah pada emiten BEI. Jony (2020) juga menunjukkan bahwa tarif pajak efektif pada perusahaan yang tercatat di BEI dapat berbeda antarperusahaan karena dipengaruhi oleh karakteristik tertentu. Dalam konteks yang lebih spesifik, Fatimah dan Mujiyati

(2025) menunjukkan bahwa pada perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2021-2023 terdapat variasi CETR yang cukup lebar. Temuan tersebut penting karena dari sudut pandang pemerintah, variasi ETR atau CETR dapat berkaitan dengan risiko fiskal, efektivitas pengawasan, dan kesinambungan penerimaan pajak korporasi.

Berkaitan dengan perilaku pajak perusahaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial, transparansi, dan pengawasan internal. Otoritas Jasa Keuangan melalui SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan merupakan laporan kepada masyarakat mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan yang melingkupi aspek ekonomi, lingkungan hidup, juga sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa CSR tidak hanya berkaitan dengan aktivitas sosial perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, *Global Reporting Initiative* melalui *GRI 13: Agriculture, Aquaculture and Fishing Sectors 2022* menunjukkan bahwa sektor yang berkaitan dengan pangan memiliki dampak keberlanjutan yang luas, terutama terhadap lingkungan, masyarakat, dan rantai nilai. Sementara itu, KNKG (2021) menjelaskan bahwa GCG mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Sebab inilah, CSR dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada lingkungan eksternal, sedangkan GCG menjadi mekanisme pengawasan internal terhadap keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pajak.

Penelitian ini memilih subsektor makanan dan minuman karena subsektor tersebut punya peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2024) menyebutkan bahwasanya industri makanan dan minuman ialah satu di antara sejumlah kontributor besar bagi PDB industri pengolahan nonmigas. Selain itu, perusahaan subsektor makanan dan minuman memiliki keterkaitan yang kuat dengan isu keberlanjutan karena aktivitas operasionalnya berhubungan dengan penggunaan bahan baku, rantai pasok, konsumsi energi, kemasan, limbah, serta dampak sosial dan lingkungan. Karakteristik tersebut membuat subsektor makanan dan minuman relevan sebagai objek studi, terutama dikarenakan perusahaan dalam subsektor ini berhubungan langsung dengan konsumen, memiliki eksposur publik yang tinggi, serta menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin besar.

Berdasarkan karakteristik tersebut, CSR dan GCG menjadi dua aspek penting yang diduga dapat memengaruhi ETR perusahaan pada subsektor makanan dan minuman. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan berisikan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan hidup, serta sosial perusahaan, sehingga CSR dapat menjadi sarana perusahaan dalam menunjukkan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Sementara itu, KNKG (2021) menegaskan bahwa tata kelola perusahaan diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan. Assidi dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa *corporate governance* punya peran dalam kaitan antara *aggressive tax planning* dan kualitas pelaporan perusahaan. Oleh karena itu, CSR dan GCG

dipandang sebagai dua mekanisme yang saling melengkapi secara konseptual dalam menjelaskan perilaku pajak perusahaan.

Meski demikian, bukti empiris terkait hubungan CSR dan GCG terhadap perilaku pajak masih memperlihatkan hasil yang beragam. Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa CSR dan komisaris independen memberi pengaruh signifikan bagi *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, sedangkan komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Laurencia dan Indarto (2025) memperlihatkan bahwasanya GCG dan CSR memberi pengaruh negatif bagi *tax avoidance*, sedangkan leverage serta *capital intensity* juga berkaitan dengan perilaku pajak perusahaan. Fatimah dan Mujiyati (2025) memperlihatkan bahwasanya pada subsektor makanan dan minuman, indikator GCG dan kinerja keuangan tertentu lebih menonjol dalam menjelaskan *tax avoidance*, sedangkan CSR tidak selalu memperlihatkan pengaruh yang konsisten. Sejumlah temuan tersebut memperlihatkan bahwasanya pengaruh CSR dan GCG bagi perilaku pajak masih perlu diuji kembali, khususnya pada perusahaan subsektor makanan dan minuman.

Bukti empiris dalam literatur yang lebih luas juga menunjukkan bahwa hubungan antara tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan perilaku pajak belum sepenuhnya konsisten. Marques dkk. (2024) memperlihatkan bahwasanya variasi hasil penelitian mengenai CSR dan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh perbedaan proksi CSR, proksi *tax avoidance*, karakteristik sampel, dan model penelitian yang digunakan. Sejalan dengan itu, Mitroulia dkk. (2025) memberi penegasan bahwasanya keterkaitan antara ESG dan *tax avoidance* dipengaruhi oleh perbedaan

indikator, konteks penelitian, serta pendekatan ekonometrika. Dengan demikian, perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya tidak hanya menunjukkan adanya *research gap*, tetapi juga menegaskan pentingnya pengujian yang lebih spesifik pada subsektor dengan karakteristik operasional dan eksposur publik yang tinggi seperti makanan dan minuman.

Didasarkan uraian tersebut, *research gap* studi ini terletak pada belum konsistennya temuan empiris mengenai hubungan CSR, GCG, dan perilaku pajak perusahaan, serta masih terbatasnya bukti empiris yang secara khusus membahas subsektor makanan dan minuman. Untuk menanggapi inkonsistensi temuan empiris tersebut, penelitian ini melakukan pengujian ulang dengan fokus pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Studi ini menguji pengaruh CSR dan GCG variabel independen terhadap ETR sebagai variabel dependen, dengan ROA dan leverage sebagai variabel kontrol. CSR diproksikan melalui *GRI Disclosure Index*, sedangkan GCG diproksikan lewat indeks komposit yang dibentuk dari komisararis independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penggunaan ROA dan leverage sebagai variabel kontrol bertujuan agar pengaruh CSR dan GCG terhadap ETR dapat dianalisis dengan lebih tepat, karena ETR juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik keuangan perusahaan. Sebab demikian, studi ini harapannya bisa memberi bukti empiris yang lebih spesifik secara sektoral terkait peran CSR dan GCG dalam menjelaskan kewajaran posisi pajak perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Direktorat Jenderal Pajak (2024) menegaskan bahwa pajak merupakan penopang utama APBN, sehingga penguatan kepatuhan dan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga penerimaan negara. Drake, Hamilton, dan Lusch (2020) menjelaskan bahwa posisi beban pajak perusahaan dapat diamati melalui indikator ETR dan CETR. Gaertner, Glover, dan Levine (2022) menunjukkan bahwa sebagian perusahaan dapat mempertahankan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang rendah dalam jangka panjang, sehingga ETR atau CETR berpotensi berada di bawah tarif pajak *statutory* yang ditentukan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif umum PPh Badan sebesar 22% yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022 sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.

Ketidakkonsistenan temuan empiris masih terlihat dalam studi mengenai pengaruh CSR dan GCG bagi kinerja pajak perusahaan melalui ETR atau CETR. Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa CSR dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Laurencia dan Indarto (2025) juga memperlihatkan bahwasanya GCG dan CSR memberi pengaruh bagi *tax avoidance*, tetapi arah dan kekuatan hubungan tersebut tetap perlu dibaca sesuai indikator, sektor, dan proksi pajak yang digunakan. Di samping itu, banyak penelitian sebelumnya menggunakan cakupan sektor yang luas, sehingga studi yang secara khusus menelaah emiten subsektor makanan dan minuman di BEI masih perlu diperkuat. *Global Reporting Initiative* (2022)

menempatkan sektor makanan dan minuman sebagai sektor yang relevan dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan karena memiliki eksposur sosial dan lingkungan, dampak sepanjang rantai nilai, dan sensitivitas reputasi yang tinggi. Marques, Montenegro, dan Brás (2024) menunjukkan bahwa hubungan CSR dan *tax avoidance* dapat berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan proksi, sampel, dan model penelitian. Sebab itu, rumusan masalah perlu difokuskan untuk menguji pengaruh CSR dan GCG terhadap ETR pada emiten subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Didasarkan penjabaran tersebut, studi ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut.

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) diproksikan melalui indeks pengungkapan CSR berbasis GRI atau *GRI Disclosure Index* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan melalui indeks komposit dari komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah, studi ini punya tujuan guna:

1. Menggambarkan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, meliputi:
  - a. Perbandingan tingkat ETR dengan tarif PPh Badan yang berlaku (22%).
  - b. Sebaran dan tren ETR antarperusahaan.
  - c. Perubahan ETR dari tahun ke tahun dalam subsektor makanan dan minuman.
2. Menganalisis pengaruh CSR diproksikan melalui *GRI based CSR Disclosure Index* yang disusun melalui *content analysis* atas *Sustainability Report* terhadap ETR perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI.
3. Menganalisis pengaruh GCG yang diproksikan melalui indeks komposit dari komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap ETR pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan:

- a. Menyediakan bukti empiris mengenai CSR dan GCG terhadap ETR pada emiten subsektor makanan serta minuman di BEI.

- b. Memperkaya literatur mengenai keterkaitan CSR, GCG, ETR dengan menegaskan bahwa secara konseptual CSR dapat berperan sebagai kanal legitimasi atau tekanan eksternal, sedangkan GCG berperan sebagai mekanisme pengendalian internal dalam menjelaskan variasi ETR perusahaan.
- c. Menjadi rujukan metodologis bagi penelitian selanjutnya melalui perumusan operasional variabel yang jelas: ETR sebagai variabel dependen, CSR sebagai variabel independen yang diproksikan melalui *GRI-based CSR Disclosure Index*, GCG sebagai variabel independen yang diproksikan lewat indeks komposit dari komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, dan leverage juga ROA sebagai variabel kontrol pada subsektor makanan dan minuman.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, studi ini membawa manfaat bagi:

### a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menguji penerapan teori akuntansi, CSR, dan GCG dalam konteks emiten subsektor makanan dan minuman, sekaligus menjadi bahan perbandingan untuk studi berikutnya.

### b. Bagi Perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI

Sebagai bahan evaluasi tingkat ETR perusahaan dibandingkan dengan tarif PPh Badan, serta dasar untuk menyelaraskan praktik CSR dan

memperkuat GCG agar perusahaan lebih transparan dan responsif terhadap risiko perpajakan, regulasi, maupun reputasi.

- c. Bagi Pemerintah dan otoritas terkait (DJP, Kementerian Keuangan, OJK, BEI)

Sebagai masukan untuk memahami pola ETR dan faktor yang memengaruhinya pada subsektor makanan dan minuman, serta bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pengawasan, edukasi, dan kebijakan yang mendorong kepatuhan serta kualitas penerimaan pajak yang berkelanjutan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, juga sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang relevan, rangkuman penelitian terdahulu, kerangka berpikir, juga perumusan hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan temuan sebelumnya.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjabarkan definisi operasional serta pengukuran variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis serta sumber data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis yang dipergunakan.

### **Bab IV Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisikan hasil penelitian, termasuk deskripsi data serta hasil analisis, untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini juga dibahas temuan utama beserta interpretasi dan kemungkinan penjelasan alternatif apabila diperlukan.

## **Bab V Penutup**

Bab ini memuat simpulan yang disusun berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, juga saran bagi studi selanjutnya dan pihak terkait sesuai temuan penelitian.

## **Daftar Pustaka**

Bagian ini berisikan seluruh sumber rujukan yang dipergunakan dalam penelitian (buku, jurnal, peraturan, dan sumber resmi lainnya) yang disusun sesuai gaya sitasi yang ditetapkan.

## **Lampiran**

Bagian ini berisi dokumen pendukung penelitian, antara lain tabel operasionalisasi variabel, ringkasan/daftar data dan indikator yang digunakan (misalnya pengukuran CSR dan GCG), serta keluaran hasil analisis statistika.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*agency theory*) ialah teori yang menjabarkan kaitan kontraktual antara pemilik perusahaan selaku *principal* dan manajemen selaku *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya hubungan keagenan muncul saat satu pihak ataupun lebih sebagai *principal* memberikan wewenang kepada pihak lain selaku *agent* untuk mengerjakan suatu jasa atau mengambil keputusan atas nama *principal*. Dalam konteks perusahaan, pemilik modal atau pemegang saham berperilaku sebagai *principal*, sementara manajemen bertindak sebagai *agent* yang diberi kewenangan untuk mengatur sumber daya perusahaan. Pendelegasian kewenangan ini diperlukan karena pemilik perusahaan tidak selalu ikut serta secara langsung dalam aktivitas operasional sehari-hari, sehingga fungsi pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh manajemen.

Meskipun hubungan tersebut dibangun untuk mencapai tujuan perusahaan, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan bisa memunculkan konflik kepentingan. Jensen dan Meckling (1976) menegaskan bahwasanya konflik tersebut terjadi karena *principal* dan *agent* tidak selalu memiliki tujuan yang sama. *Principal* umumnya mengharapkan peningkatan nilai perusahaan, keberlanjutan usaha, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengelolaan risiko yang baik.

Sebaliknya, *agent* dapat memiliki kepentingan pribadi, seperti pencapaian target laba jangka pendek, peningkatan kompensasi, reputasi profesional, keamanan jabatan, atau penilaian kinerja yang lebih baik. Dalam konteks perpajakan, Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tersebut dapat membuat manajemen terdorong mengambil keputusan pajak yang membuat untung pihak tertentu, meskipun keputusan tersebut belum tentu sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Konflik kepentingan dalam hubungan keagenan semakin sulit dikendalikan ketika terjadi asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya asimetri informasi dapat muncul karena manajemen punya akses atas informasi internal perusahaan yang lebih luas dibanding pemilik perusahaan. Manajemen mengetahui kondisi operasional, keuangan, strategi, dan risiko perusahaan secara lebih mendalam karena terlibat langsung dalam proses pengelolaan. Sementara itu, pemilik perusahaan hanya memperoleh informasi melalui laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, juga mekanisme pelaporan lainnya. Assidi dkk. (2022) juga menegaskan bahwa perbedaan informasi dan kualitas pelaporan dapat berkaitan dengan ruang diskresi manajemen dalam membuat keputusan, termasuk keputusan yang berhubungan dengan pajak.

Ketika terjadi situasi asimetri informasi, manajemen memiliki ruang yang lebih besar untuk memilih kebijakan yang dapat membentuk persepsi atas kinerja perusahaan. Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, maupun keputusan perpajakan. Apabila pengawasan tidak berjalan secara efektif, manajemen dapat memilih kebijakan yang lebih

menguntungkan kepentingannya sendiri. Jensen dan Meckling (1976) mengaitkan kondisi tersebut dengan potensi *moral hazard*, yaitu kecenderungan *agent* untuk bertindak oportunistik karena tindakannya tidak sepenuhnya dapat dipantau atau dibuktikan oleh *principal*. Sejalan dengan itu, Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa perilaku pajak yang agresif dapat dijelaskan melalui perspektif keagenan karena adanya peluang manajemen untuk memanfaatkan ruang diskresi dalam pengambilan keputusan.

Pada konteks perpajakan, teori keagenan relevan karena pajak merupakan komponen biaya yang secara langsung mengurangi laba sesudah pajak. Alkausar dkk. (2020) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat muncul ketika manajemen memiliki dorongan untuk menekan beban pajak agar laba setelah pajak terlihat lebih tinggi. Laba yang lebih tinggi dapat memengaruhi penilaian kinerja perusahaan, kompensasi manajemen, dan persepsi investor terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, manajemen dapat terdorong membuat perencanaan pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Assidi dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa praktik *aggressive tax planning* dapat berkaitan dengan kualitas tata kelola dan pelaporan perusahaan.

Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa agresivitas pajak bisa dijelaskan lewat perspektif teori keagenan sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen serta pemilik perusahaan. Dalam kerangka tersebut, keputusan pajak tidak sebatas dipahami sebagai keputusan teknis perpajakan, namun turut sebagai keputusan manajerial yang dapat dipengaruhi oleh insentif, target kinerja, dan kepentingan tertentu. Manajemen dapat memanfaatkan kompleksitas aturan pajak

dan ruang diskresi dalam pelaporan untuk menekan beban pajak perusahaan. Sebab itu, perilaku pajak perusahaan butuh dianalisis dengan mencermati hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen.

Selain berkaitan dengan konflik kepentingan, keputusan perpajakan juga berhubungan dengan kualitas tata kelola perusahaan. Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa praktik *aggressive tax planning* dapat berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya mekanisme pengawasan punya peran krusial dalam membatasi keputusan pajak yang terlalu agresif. Bila tata kelola perusahaan berlangsung dengan ideal, maka keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pajak, dapat diawasi secara lebih efektif. Sebaliknya, lemahnya mekanisme pengawasan bisa memberi kemungkinan lebih besar bagi manajemen untuk mengerjakan tindakan oportunistik.

Berdasarkan teori keagenan, *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan sebagai mekanisme pengawasan internal untuk meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya mekanisme pengawasan diperlukan untuk membatasi peluang perilaku oportunistik dalam hubungan keagenan. Dalam konteks perusahaan, mekanisme GCG seperti komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional dapat membantu memperkuat fungsi monitoring terhadap keputusan manajemen. Assidi dkk. (2022) juga memperlihatkan bahwasanya tata kelola perusahaan punya peran krusial dalam membatasi praktik perencanaan pajak agresif dan meningkatkan kualitas pelaporan.

Dengan demikian, teori keagenan menjadi dasar fundamental dalam studi ini sebab mampu menjelaskan kaitan antara manajemen, pemilik perusahaan, tata kelola, dan keputusan perpajakan. Jensen dan Meckling (1976) memberikan dasar bahwasanya konflik kepentingan dan asimetri informasi bisa mendorong perilaku oportunistik manajemen. Alkausar dkk. (2020) memperkuat hubungan tersebut dalam konteks agresivitas pajak, sedangkan Assidi dkk. (2022) menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan dalam membatasi praktik *aggressive tax planning*. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi dasar menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), yang diproksikan melalui komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen dalam penelitian ini.

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menyebut bahwasanya perusahaan butuh mendapat serta menjaga penerimaan sosial dari masyarakat serta pemilik kepentingan agar kegiatan usahanya dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, perusahaan tidak sebatas dinilai berdasarkan kecakapan mendapat laba, namun turut berdasarkan kesesuaian aktivitas operasionalnya dengan nilai, norma, dan harapan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. KPMG (2022b) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih tinggi mengenai dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan itu, *Global Reporting Initiative* (2022) menekankan pentingnya pengungkapan dampak ekonomi,

lingkungan, dan sosial agar informasi keberlanjutan dapat dipahami serta digunakan oleh pemangku kepentingan.

Legitimasi perusahaan dapat dibangun melalui pengungkapan informasi yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Satu di antara sejumlah bentuk pengungkapan tersebut ialah *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan atas dampak ekonomi, sosial, juga lingkungan. KPMG (2022b) menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan menjadi sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan komitmen, kebijakan, serta dampak kegiatan bisnisnya kepada publik. Dengan demikian, CSR dapat dipahami sebagai instrumen yang membantu perusahaan menunjukkan bahwa kegiatan bisnisnya tidak sebatas berorientasi pada pemasukan, namun turut mencermati dampak sosial juga lingkungan yang ditimbulkan.

Berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi salah satu rujukan penting karena menyediakan kerangka pengungkapan yang membantu perusahaan menyajikan informasi secara lebih terstruktur. *Global Reporting Initiative* (2022) menempatkan sektor makanan dan minuman sebagai sektor yang relevan dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan karena karakteristik dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan rantai nilai. Oleh karena itu, penggunaan *GRI Disclosure Index* dalam penelitian ini relevan karena dapat mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan aspek keberlanjutan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan.

Terkait perpajakan, teori legitimasi relevan karena perilaku pajak perusahaan bisa memengaruhi persepsi publik atas tanggung jawab sosial perusahaan. KPMG (2022a) menekankan bahwa isu pajak tidak sebatas berkenaan dengan kepatuhan administratif, namun turut berkenaan dengan risiko reputasi, tata kelola, dan ekspektasi pemangku kepentingan. Pajak merupakan kontribusi perusahaan kepada negara dan masyarakat, sehingga kebijakan pajak yang dipersepsikan terlampaui agresif bisa memunculkan risiko reputasi. Dalam konteks ini, Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR menggambarkan perbandingan antara beban pajak dan penghasilan, sehingga dapat digunakan untuk melihat Tingkat beban pajak efektif.

Berdasarkan teori legitimasi, CSR dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme legitimasi eksternal. KPMG (2022b) menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan dapat meningkatkan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, *Global Reporting Initiative* (2022) menekankan pentingnya pengungkapan dampak organisasi secara terstruktur, termasuk pada sektor yang memiliki dampak luas seperti makanan dan minuman. Dengan demikian, perusahaan yang mengungkapkan CSR secara lebih luas diharapkan punya dorongan yang lebih kuat untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dorongan tersebut diperkirakan dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan yang terefleksi lewat ETR sebagai variabel dependen.

### 2.1.3 *Effective Tax Rate (ETR)*

*Effective Tax Rate (ETR)* ialah rasio yang memberi gambaran terkait besarnya beban pajak penghasilan perusahaan dibandingkan laba sebelum pajak. Drake, Hamilton, dan Lusch (2020) menjelaskan bahwa ETR sering digunakan untuk mengamati variasi beban pajak efektif antarperusahaan maupun antarperiode. Penggunaan ETR memungkinkan peneliti untuk melihat proporsi laba perusahaan yang dialokasikan sebagai beban pajak penghasilan. Dalam penelitian ini, ETR ditempatkan sebagai variabel dependen yang diperkirakan terpengaruh oleh CSR dan GCG.

ETR pada umumnya dihitung dengan memperbandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Pengukuran tersebut memperlihatkan tingkat pajak efektif yang ditanggung perusahaan berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR dapat digunakan untuk membandingkan beban pajak efektif antarperusahaan, meskipun setiap perusahaan dapat memiliki kondisi operasional, kebijakan akuntansi, dan perlakuan fiskal yang berbeda. Sebab itu, ETR tidak sebatas terpengaruh oleh tarif pajak yang berlaku, namun turut oleh karakteristik dan kebijakan perusahaan.

Nilai ETR yang rendah sering dikaitkan dengan adanya perencanaan pajak, tetapi ETR yang rendah tidak selalu menunjukkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Christensen, Kenchington, dan Laux (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ETR rendah dapat memiliki penyebab yang beragam, termasuk faktor fiskal tertentu yang sah. ETR dapat dipengaruhi oleh perbedaan temporer, perbedaan permanen, kompensasi kerugian, insentif

pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, maupun kebijakan akuntansi perusahaan. Drake dkk. (2020) juga menegaskan bahwa ETR perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang memberi pengaruh bagi beban pajak efektif perusahaan.

Schwab, Stomberg, dan Xia (2022) menunjukkan bahwa ETR dapat dipengaruhi oleh faktor pajak maupun faktor nonpajak. Faktor pajak dapat meliputi tarif pajak, insentif perpajakan, koreksi fiskal, dan perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Sementara itu, faktor nonpajak dapat berupa profitabilitas, struktur pendanaan, karakteristik operasional, serta kebijakan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan ETR tidak selalu berasal dari strategi perpajakan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan kegiatan operasional perusahaan.

Pada konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif umum Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022. Penelitian ini menggunakan tarif 22% sebagai *benchmark* atau tarif *statutory* untuk membandingkan tingkat ETR perusahaan secara deskriptif. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menggambarkan posisi beban pajak efektif perusahaan terhadap tarif umum PPh Badan yang berlaku. Namun, perbedaan antara ETR dan tarif 22% tidak secara langsung digunakan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya ketidakpatuhan pajak karena ETR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor fiskal dan nonfiskal.

Menurut perspektif teori keagenan, perpajakan dapat menjadi salah satu area munculnya perilaku oportunistik manajemen. Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan bisa menghadirkan konflik kepentingan antara pemilik bersama manajemen. Dalam konteks perpajakan, Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa agresivitas pajak bisa dijelaskan lewat perspektif *agency theory* sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Pajak ialah komponen biaya yang memotong laba setelah pajak, sehingga manajemen dapat memiliki dorongan untuk mengelola beban pajak agar laba perusahaan terlihat lebih tinggi.

Mengacu pada kerangka tersebut, ETR yang rendah bisa mencerminkan adanya usaha untuk menekan beban pajak. Namun, Christensen dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR rendah tidak dapat langsung disimpulkan sebagai agresivitas pajak karena penyebabnya dapat berasal dari faktor akuntansi dan fiskal yang sah. Sebab itu, ETR saat penelitian ini dipergunakan sebagai ukuran beban pajak efektif perusahaan dan bukan sebagai ukuran langsung ketidakpatuhan atau penghindaran pajak.

Berkaitan dengan penelitian ini, GCG dipahami sebagai mekanisme pengawasan internal yang bisa memengaruhi keputusan manajemen dalam bidang perpajakan. KNKG (2021) menjelaskan bahwa prinsip tata kelola perusahaan melingkupi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Sejalan dengan itu, Assidi dkk. (2022) memperlihatkan bahwasanya tata kelola perusahaan memiliki peran dalam membatasi praktik *aggressive tax planning*. Mekanisme GCG seperti komisaris independen, komite audit, dan

kepemilikan institusional harapannya bisa memperkuat pengawasan terhadap proses pelaporan serta pengambilan keputusan perusahaan. Pengawasan tersebut selanjutnya dapat memengaruhi tingkat ETR perusahaan.

Selain GCG, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat berperan sebagai mekanisme legitimasi eksternal. KPMG (2022b) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin penting karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih besar. *Global Reporting Initiative* (2022) juga menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman punya karakteristik dampak yang luas terhadap lingkungan, masyarakat, dan rantai nilai, sehingga pengungkapan keberlanjutan menjadi penting. Perusahaan yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan dan reputasi diperkirakan akan mempertimbangkan persepsi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk keputusan perpajakan.

ETR saat penelitian ini diposisikan sebagai variabel dependen yang menunjukkan proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. ETR diperkirakan dipengaruhi oleh CSR sebagai mekanisme legitimasi eksternal dan GCG sebagai mekanisme pengawasan internal. Meskipun demikian, ETR tetap perlu ditafsirkan secara cermat sebab bisa terpengaruh oleh faktor pajak maupun nonpajak. Sebab itu, studi ini juga memanfaatkan ROA serta DER sebagai variabel kontrol untuk mempertimbangkan pengaruh profitabilitas dan struktur pendanaan perusahaan terhadap ETR.

#### 2.1.4 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* ialah wujud komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak ekonomi, sosial, juga lingkungan yang hadir dari kegiatan operasionalnya. KPMG (2022b) menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin penting karena pemangku kepentingan meminta informasi yang lebih transparan terkait dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan itu, *Global Reporting Initiative (2022)* menekankan pentingnya pengungkapan dampak ekonomi, lingkungan, juga sosial agar informasi yang disampaikan perusahaan dapat dipahami dan dibandingkan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, CSR dapat dipahami sebagai bagian dari akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan usaha secara bertanggung jawab serta berkelanjutan.

Di Indonesia, praktik CSR mendapat penguatan melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan serta lingkungan. JDIH BPK (2024) menegaskan bahwa keberadaan dasar hukum tersebut membuat CSR tidak semata dipahami sebagai kegiatan sukarela, melainkan bagian dari kerangka kebijakan yang mendorong perusahaan menjalankan fungsi sosialnya sesuai kepentingan publik. Dengan demikian, CSR dapat dipahami sebagai aspek yang menyertai tata kelola tanggung jawab perusahaan, bukan sekadar program sesaat.

Secara konseptual, CSR berkaitan dengan cara perusahaan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Global Reporting Initiative* (2022) menekankan bahwa pengungkapan keberlanjutan perlu mencakup dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial agar pemangku kepentingan dapat memahami kontribusi serta dampak perusahaan secara lebih menyeluruh. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa CSR mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, hubungan dengan karyawan, keselamatan konsumen, dampak terhadap masyarakat, serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif teori legitimasi, CSR dapat berperan sebagai mekanisme yang membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan penerimaan sosial dari pemangku kepentingan. Berdasarkan *Global Reporting Initiative* (2024) Perusahaan yang mengungkapkan CSR secara lebih luas menunjukkan adanya upaya untuk menyampaikan informasi terkait tanggung jawab sosial juga lingkungan secara transparan. Pengungkapan tersebut bisa menambah tingkat kepercayaan pemangku kepentingan sebab perusahaan memperlihatkan bahwasanya kegiatan operasionalnya tidak sebatas berorientasi pada pemasukan, namun turut mencermati dampak yang ditimbulkan. Sejalan dengan perkembangan praktik bisnis, KPMG (2022b) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian karena pemangku kepentingan menuntut informasi yang lebih terbuka mengenai dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Terkait perpajakan, CSR menjadi relevan karena perilaku pajak perusahaan dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada negara

juga masyarakat. KPMG (2022a) menekankan bahwa isu pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dengan risiko reputasi, tata kelola, dan ekspektasi pemangku kepentingan. Pajak merupakan kontribusi perusahaan terhadap pembiayaan publik, sehingga kebijakan perpajakan yang dipersepsikan terlalu agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Drake dkk. (2020) juga menjelaskan bahwa ETR menggambarkan perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak, sehingga bisa dipergunakan untuk mengukur tingkat beban pajak efektif perusahaan.

Dilihat dari perspektif teori keagenan, CSR juga dapat berperan sebagai mekanisme yang meningkatkan tekanan eksternal terhadap manajemen. Pengungkapan CSR membuat aktivitas perusahaan menjadi lebih terbuka untuk dinilai oleh pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, konsumen, dan masyarakat. Kondisi ini dapat membatasi ruang manajemen untuk mengambil keputusan yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak. Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa agresivitas pajak bisa dijelaskan lewat perspektif teori keagenan sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Sebab itu, makin tinggi tuntutan transparansi perusahaan, makin besar pula dorongan bagi manajemen untuk menjaga kebijakan perusahaan agar lebih akuntabel, termasuk dalam keputusan perpajakan.

Hubungan antara CSR dan ETR tidak selalu bersifat langsung karena CSR dalam penelitian ini diukur melalui tingkat pengungkapan, bukan kualitas

pelaksanaan program CSR. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR dipakai guna mengukur proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak, sedangkan Schwab dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR dapat dipengaruhi oleh faktor pajak maupun nonpajak. Dengan demikian, perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi tidak otomatis punya kebijakan pajak yang lebih konservatif karena keputusan pajak tetap dapat dipengaruhi oleh strategi perencanaan pajak, struktur pendanaan, profitabilitas, insentif pajak, dan penyesuaian fiskal. Sebab itu, pengaruh CSR sebagai variabel independen bagi ETR sebagai variabel dependen perlu diuji secara empiris.

Seiring berkembangnya praktik pelaporan keberlanjutan, perusahaan menggunakan berbagai kerangka untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan keterbandingan pengungkapan. *Global Reporting Initiative* (GRI) ialah satu di antara sejumlah kerangka pelaporan keberlanjutan yang digunakan untuk membantu organisasi mengungkap dampak ekonomi, lingkungan, juga sosial secara lebih terstruktur. Dalam penelitian ini, GRI digunakan sebagai dasar pengukuran CSR melalui *GRI Disclosure Index*. Indeks tersebut disusun dengan cara menilai apakah perusahaan mengungkapkan item-item tertentu dalam laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan. Sebab demikian, CSR saat penelitian ini dipahami sebagai tingkat kelengkapan pengungkapan keberlanjutan, bukan sebagai penilaian langsung atas keberhasilan program CSR Perusahaan.

Didasarkan penjabaran tersebut, CSR saat penelitian ini diposisikan sebagai mekanisme legitimasi eksternal yang dapat mendorong perusahaan menjaga akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan. KPMG (2022b) menegaskan

bahwa pelaporan keberlanjutan menjadi penting karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih tinggi. *Global Reporting Initiative (2022)* juga memperkuat bahwa pengungkapan keberlanjutan membantu organisasi menyampaikan dampaknya secara lebih terstruktur. Dengan demikian, perusahaan yang punya pengungkapan CSR lebih luas diharapkan makin memperhatikan reputasi, transparansi, dan keputusan perpajakannya, yang dalam penelitian ini tercermin melalui ETR sebagai variabel dependen.

#### **2.1.5 *Good Corporate Governance (GCG)***

*Good Corporate Governance (GCG)* ialah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, serta mengawasi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta wajar. Dalam konteks perusahaan, GCG tidak sebatas punya kaitan dengan kepatuhan administratif, namun turut berhubungan dengan bagaimana perusahaan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara cermat, terbuka, juga memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. KNKG (2021) menjelaskan bahwa sejumlah prinsip tata kelola yang ideal melingkupi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Prinsip tersebut menjadi dasar penting bagi perusahaan dalam membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang dapat mendukung keberlanjutan usaha juga meningkatkan kepercayaan pemilik kepentingan.

Penguatan tata kelola perusahaan di Indonesia turut tercermin lewat sejumlah pedoman dan regulasi yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengawasan. Permen BUMN PER-2/MBU/03/2023 memperbarui pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan pada Badan Usaha Milik Negara, yang pada prinsipnya menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Meskipun regulasi tersebut secara khusus berlaku pada BUMN, substansi tata kelola yang ditekankan tetap relevan sebagai rujukan konseptual bahwa perusahaan perlu memiliki mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan keputusan korporasi berjalan sesuai dengan kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan.

Bagi pemerintah dan regulator pasar modal, GCG memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas dunia usaha, melindungi kepentingan publik, serta mengurangi risiko penyimpangan manajerial. Perusahaan yang mengimplementasikan tata kelola dengan ideal harapannya bisa menyajikan informasi secara lebih transparan, menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, dan mematuhi ketentuan yang berlaku. OJK (2021) melalui SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 mengatur bentuk serta isi laporan tahunan emiten ataupun perusahaan publik, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan. Dengan demikian, transparansi tata kelola menjadi bagian penting dari akuntabilitas perusahaan publik karena laporan tahunan dipakai oleh investor, regulator, juga pemangku kepentingan lain untuk memberi penilaian terkait kualitas pengelolaan perusahaan.

Didasarkan teori keagenan, GCG diposisikan sebagai mekanisme kontrol internal yang bertujuan guna mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik perusahaan sebagai *principal* serta manajemen sebagai *agent*. Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan bisa memunculkan konflik kepentingan sebab manajemen tidak selalu berperilaku sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemilik. Alkausar dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong tindakan oportunistik, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Dalam kondisi tersebut, GCG diperlukan untuk memperkuat fungsi *monitoring* terhadap keputusan manajemen agar keputusan yang diambil lebih akuntabel dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek manajemen.

Kebijakan perpajakan, GCG menjadi relevan karena kebijakan pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh insentif dan keputusan manajemen. Pajak ialah komponen biaya yang bisa memotong laba sesudah pajak, sehingga manajemen dapat memiliki dorongan untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa praktik *aggressive tax planning* dapat berkaitan dengan kualitas tata kelola dan pelaporan perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme GCG diperlukan untuk mengawasi keputusan perpajakan perusahaan agar tetap akuntabel, sesuai ketentuan, dan tidak menimbulkan risiko kepatuhan maupun reputasi.

Penelitian ini mengukur GCG menggunakan indeks komposit yang terbentuk dari tiga mekanisme tata kelola, yakni komisararis independen, komite

audit, serta kepemilikan institusional. Ketiga mekanisme tersebut digunakan karena secara konseptual merepresentasikan kekuatan pengawasan internal perusahaan. Komisaris independen mencerminkan keberadaan pihak yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih objektif terhadap keputusan manajemen. Komite audit punya peran dalam membantu pengawasan terhadap pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta kepatuhan perusahaan. Sementara itu, kepemilikan institusional mencerminkan potensi pengawasan dari investor institusional terhadap kebijakan manajemen. Ketiga indikator tersebut kemudian dinormalisasi dan digabungkan menjadi satu indeks komposit GCG agar tata kelola perusahaan dapat dianalisis sebagai satu variabel dalam model penelitian.

Secara empiris, kaitan antara GCG dan perilaku pajak perusahaan masih memperlihatkan hasil yang beragam. Laurencia dan Indarto (2025) menunjukkan bahwa GCG berkaitan dengan *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di BEI. Sementara itu, Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa pada perusahaan *food and beverage*, indikator tata kelola tidak selalu memberikan pengaruh yang sama terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya efektivitas GCG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perangkat tata kelola secara formal, tetapi juga oleh kualitas implementasi, indikator yang digunakan, karakteristik perusahaan, dan sektor penelitian.

Didasarkan penjabaran tersebut, GCG dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme pengawasan internal yang berpotensi memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) memberikan dasar

bahwasanya konflik kepentingan dapat hadir ketika terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat berperan dalam membatasi praktik perencanaan pajak agresif, sedangkan Laurencia dan Indarto (2025) memperlihatkan bahwa GCG berkaitan dengan perilaku pajak perusahaan. Sebab itu, studi ini memanfaatkan indeks komposit GCG yang dibentuk dari komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **2.1.6 Leverage**

*Leverage* ialah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan pendanaan berbasis utang dalam struktur keuangannya. Ross dkk. (2022) memberi penjelasan bahwasanya pemakaian utang dalam struktur pendanaan dapat memengaruhi risiko keuangan perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Sejalan dengan itu, Atrill dan McLaney (2023) menempatkan rasio *leverage* sebagai indikator yang dipakai guna menilai struktur pembiayaan dan kemampuan perusahaan mencukupi kewajiban keuangannya. Dengan demikian, *leverage* tidak hanya menggambarkan struktur pendanaan, tetapi juga memberikan indikasi mengenai risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

Litaratur keuangan sering menjelaskan *leverage* melalui kerangka *trade-off* antara manfaat penggunaan utang dan peningkatan risiko kesulitan keuangan.

Penggunaan utang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Namun, peningkatan utang juga dapat menambah beban tetap berupa bunga dan kewajiban pembayaran pokok utang yang wajib dilunaskan perusahaan. Sejalan dengan itu, Purba dkk. (2024) memperlihatkan bahwasanya leverage menjadi satu di antara sejumlah faktor keuangan yang relevan dalam penelitian penghindaran pajak pada sektor makanan dan minuman, karena struktur pendanaan perusahaan dapat berkaitan dengan beban keuangan dan keputusan perpajakan. Karena itu, tingkat leverage yang optimal bukan hanya persoalan akses pendanaan, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara manfaat penggunaan utang dan risiko yang ditimbulkan bagi keberlanjutan perusahaan.

*Leverage* juga dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin karena adanya kewajiban pembayaran utang bisa membuat manajemen terdorong untuk lebih cermat saat menggunakan sumber daya perusahaan. Saragih dan Halawa (2022) menempatkan leverage sebagai satu di antara sejumlah faktor yang bisa berpengaruh bagi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, sehingga leverage tidak sebatas relevan dari sisi struktur modal, namun turut dari sisi konsekuensi keuangan serta perpajakan perusahaan. Namun, pada tingkat tertentu leverage juga dapat membatasi fleksibilitas perusahaan karena beban utang yang besar dapat mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan investasi atau mengambil keputusan strategis baru. Dalam konteks ini, leverage memiliki implikasi tata kelola yang tidak sederhana, sebab di satu sisi bisa

membatasi ruang manajerial, namun di sisi lain turut bisa membatasi fleksibilitas strategi perusahaan.

Dari sisi perpajakan, penggunaan utang berkaitan erat dengan beban bunga karena biaya bunga pada umumnya dapat memengaruhi perhitungan laba kena pajak. Lubis (2022) menggunakan leverage sebagai salah satu faktor yang memberi pengaruh bagi tarif pajak efektif pada perusahaan makanan dan minuman, sedangkan Lahtifi (2022) juga menempatkan leverage sebagai variabel yang diuji dalam kaitannya dengan *Effective Tax Rate*. Struktur pendanaan berbasis utang dapat membuat perusahaan memiliki beban bunga yang lebih besar, sehingga pada kondisi tertentu dapat menurunkan laba sebelum pajak dan memengaruhi besaran pajak yang ditanggung perusahaan. Sebab itu, *leverage* menjadi relevan dalam penelitian perpajakan karena perbedaan struktur pendanaan antarperusahaan dapat menyebabkan perbedaan beban pajak efektif.

Penelitian yang menggunakan ETR sebagai ukuran beban pajak efektif perusahaan, leverage perlu dikontrol karena struktur pendanaan berbasis utang dapat memengaruhi beban pajak melalui biaya bunga. Christensen dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR rendah bisa diakibatkan oleh sejumlah faktor juga tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan pajak, sehingga faktor keuangan perusahaan perlu diperhatikan dalam interpretasi ETR. Dengan memasukkan leverage sebagai variabel kontrol, variasi ETR diharapkan tidak keliru diatribusikan sebagai dampak CSR atau GCG, padahal variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan struktur pendanaan, tingkat utang, dan besaran biaya bunga. Oleh karena itu, leverage digunakan sebagai variabel kontrol agar hubungan antara CSR, GCG, dan ETR

dapat dianalisis dengan lebih tepat pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Purba dkk. (2024) juga mendukung penggunaan leverage dalam kajian penghindaran pajak pada sektor makanan dan minuman.

### 2.1.7 *Return on Assets (ROA)*

*Return on Assets (ROA)* ialah rasio profitabilitas yang menggambarkan kecakapan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dikelola. Ross, Westerfield, Jaffe, dan Jordan (2022) menyatakan bahwa ROA dipergunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mendapat laba lewat pemanfaatan aset yang dipunya. Atrill dan McLaney (2023) menekankan bahwa ROA relevan karena mencerminkan produktivitas aset, rasio ini dapat membantu menilai kinerja pada periode berjalan sekaligus memberi gambaran bagi evaluasi kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, ROA tidak hanya menggambarkan tingkat profitabilitas, namun turut memperlihatkan efektivitas perusahaan dalam mengatur aset guna mendapat keuntungan.

Teori keagenan menjelaskan bahwa profitabilitas seperti ROA berkaitan erat dengan insentif manajerial karena laba sering menjadi dasar evaluasi kinerja, pemberian bonus, serta pembentukan reputasi manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya konflik kepentingan bisa muncul ketika manajemen sebagai *agent* memiliki tujuan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik sebagai *principal*. Ketika laba menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja, manajer dapat terdorong untuk mengelola beban pajak agar laba setelah pajak terlihat lebih tinggi. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR dapat

digunakan untuk membaca variasi beban pajak efektif perusahaan, sedangkan Schwab dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak. Oleh karena itu, perbedaan profitabilitas dapat tercermin dalam variasi ETR antarperusahaan maupun antarperiode.

Dari perspektif pemerintah, ROA juga dapat dipahami sebagai cerminan kapasitas ekonomi perusahaan yang berkaitan dengan potensi basis pajak. Perusahaan yang lebih mampu menghasilkan laba biasanya memiliki kapasitas lebih besar untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak. Namun, perbedaan profitabilitas dapat menyebabkan variasi beban pajak efektif sebab perusahaan dengan tingkat laba yang berbeda bisa mempunyai strategi perencanaan pajak, penyesuaian fiskal, dan pemanfaatan insentif yang berbeda pula. Christensen dkk. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ETR rendah dapat memiliki penyebab yang beragam, sedangkan Schwab dkk. (2022) menegaskan bahwa ETR dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak. Purba dkk. (2024) juga menggunakan profitabilitas sebagai faktor yang relevan dalam kajian penghindaran pajak sektor makanan dan minuman. Karena itu, ROA dimasukkan sebagai variabel kontrol agar hubungan CSR dan GCG terhadap ETR tidak bias akibat perbedaan kemampuan menghasilkan laba di antara perusahaan yang diteliti.

### **2.1.8 Karakteristik sektor Makanan dan Minuman**

Subsektor makanan dan minuman ialah bagian dari industri manufaktur yang mencakup kegiatan produksi, pengolahan, serta distribusi produk pangan dan minuman siap konsumsi. Investopedia (2025) menyebutkan bahwa produk

makanan dan minuman termasuk *fast moving consumer goods* (FMCG) karena bersifat cepat terjual dan dibeli berulang. Karakter ini membuat subsektor makanan dan minuman punya peran strategis dalam perekonomian, terutama karena menopang konsumsi rumah tangga, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi pada penerimaan negara. Kementerian Perindustrian (2024) melaporkan bahwa pada triwulan II 2024 struktur PDB industri pengolahan nonmigas didominasi oleh industri makanan dan minuman dengan kontribusi 38,4%, yang menegaskan posisinya sebagai kontributor utama dalam industri pengolahan nonmigas.

Karakter produk makanan dan minuman sebagai FMCG membuat permintaannya cenderung relatif stabil karena produk tersebut punya kaitan langsung dengan keperluan konsumsi masyarakat sehari-hari. Namun, stabilitas permintaan tidak menghilangkan tekanan persaingan karena perusahaan tetap dituntut untuk melakukan inovasi produk, menjaga efisiensi biaya, dan memperkuat kapasitas operasional. Merujuk pada Kementerian Perindustrian (2024), peran besar industri makanan dan minuman juga didukung oleh aktivitas ekspor dan investasi yang menunjukkan pentingnya subsektor ini dalam memperkuat daya saing industri nasional. Di sisi lain, perusahaan makanan dan minuman juga menghadapi tuntutan kepatuhan yang lebih ketat karena produk yang dihasilkan berhubungan langsung dengan keamanan dan kesehatan konsumen. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023, pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri ataupun diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, serta label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek kesehatan dan keselamatan konsumen menjadi dimensi penting karena subsektor ini berhubungan langsung dengan konsumsi masyarakat. BPOM (2023) menegaskan bahwa pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor dan diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib punya perizinan berusaha untuk menunjang aktivitas usaha ataupun PB-UMKU. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan prasyarat untuk memastikan keamanan, mutu, gizi, dan label produk yang beredar di masyarakat. Kedekatan dengan konsumen juga membuat perusahaan makanan dan minuman lebih mudah berada dalam sorotan publik, sehingga risiko reputasi dapat meningkat ketika terjadi isu terkait mutu, keamanan, label, atau kepatuhan terhadap regulasi produk pangan (BPOM, 2023).

Selain itu, dampak sosial lingkungan subsektor makanan dan minuman juga signifikan karena melibatkan penggunaan bahan baku, energi, dan air, juga menghasilkan limbah dan kemasan. Kondisi ini mendorong meningkatnya perhatian pemangku kepentingan terhadap efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan rantai pasok. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, kerangka GRI menekankan pengungkapan dampak organisasi pada aspek ekonomi, lingkungan, dan manusia. GRI (2022) juga menempatkan sektor pangan dan minuman sebagai prioritas dalam pengembangan *GRI Sector Standards* untuk meningkatkan konsistensi, keterbandingan, dan mutu pengungkapan topik material di sepanjang rantai nilai, misalnya keamanan produk, informasi nutrisi, dampak lingkungan, ketenagakerjaan, serta hubungan dengan komunitas.

Subsektor makanan dan minuman memiliki eksposur publik yang tinggi serta sensitivitas reputasi yang kuat, sehingga relevan digunakan untuk menguji keterkaitan mekanisme legitimasi eksternal dan kontrol internal terhadap perilaku kepatuhan perusahaan. Secara konseptual, perusahaan yang menonjolkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR serta menerapkan tata kelola yang baik diharapkan menunjukkan perilaku fiskal yang lebih wajar. Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya mekanisme kontrol diperlukan untuk membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam hubungan keagenan. KPMG (2022b) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan meningkatkan transparansi perusahaan terhadap pemangku kepentingan, sedangkan *Global Reporting Initiative* (2022) menempatkan sektor makanan dan minuman sebagai sektor yang relevan dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan. Selain itu, KNKG (2021) menekankan pentingnya prinsip tata kelola dalam memperkuat akuntabilitas perusahaan. Oleh karena itu, subsektor makanan dan minuman dipandang tepat untuk menganalisis pengaruh CSR dan GCG *Effective Tax Rate* (ETR).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai ETR, CETR, maupun *current* ETR umumnya mengaitkan variasi beban pajak perusahaan dengan mekanisme tata kelola perusahaan, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta karakteristik keuangan seperti leverage, *capital intensity*, dan profitabilitas. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR sering digunakan untuk membaca variasi beban pajak efektif perusahaan, meskipun interpretasinya perlu dilakukan secara hati-hati karena ETR

tidak selalu secara langsung menunjukkan ketidakpatuhan pajak. Secara konseptual, GCG dipandang sebagai mekanisme pengawasan internal yang bisa memberi batasan bagi tindakan oportunistik manajemen, sementara CSR diposisikan sebagai jalur legitimasi sosial yang mendorong perusahaan lebih cermat dalam membuat keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Selain itu, Assidi dkk. (2022) dan Schwab dkk. (2022) menjelaskan bahwa karakteristik keuangan perusahaan dapat memengaruhi insentif dan ruang perencanaan pajak melalui struktur pendanaan, tingkat profitabilitas, dan komposisi investasi perusahaan.

Pada emiten Bursa Efek Indonesia, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwasanya kaitan antara GCG, CSR, dan perilaku pajak perusahaan masih menghasilkan temuan yang beragam. Laurencia dan Indarto (2025) melaporkan bahwa GCG dan CSR memberi pengaruh negatif bagi *tax avoidance*, yang maknanya makin baik tata kelola perusahaan dan makin tinggi pengungkapan CSR, kecenderungan perusahaan menghindari pajak cenderung menurun. Penelitian Laurencia dan Indarto (2025) juga memperlihatkan bahwasanya leverage dan *capital intensity* memberi pengaruh positif bagi *tax avoidance*, sehingga karakteristik keuangan tetap perlu diperhatikan dalam menjelaskan variasi perilaku pajak perusahaan. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Schwab dkk. (2022) bahwa perilaku pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek tata kelola dan legitimasi sosial, namun juga oleh kondisi internal perusahaan seperti struktur pendanaan dan intensitas aset.

Pada konteks subsektor yang lebih spesifik, penelitian pada perusahaan makanan dan minuman juga memperlihatkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Noorprasetya dan Prasetya (2023) pada perusahaan subsektor *food and beverage* periode 2019-2022 menemukan bahwa CSR dan proporsi komisaris independen memberi pengaruh signifikan bagi *tax avoidance* yang diproksikan dengan *current ETR*, sedangkan komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu, Fatimah dan Mujiyati (2025) pada subsektor makanan dan minuman periode 2021-2023 memperlihatkan bahwasanya indikator GCG dan kinerja keuangan tertentu lebih menonjol dalam menjelaskan *tax avoidance*, sedangkan CSR tidak selalu menunjukkan pengaruh yang konsisten ketika diuji bersama variabel lain. Selain itu, Dewi dan Nustini (2024) menempatkan GCG sebagai variabel moderasi dalam kaitan CSR, *leverage*, *capital intensity*, serta profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya pengaruh CSR dan GCG bagi perilaku pajak dapat dipengaruhi oleh indikator yang digunakan, karakteristik sektor, dan periode penelitian.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, hubungan CSR, GCG, serta karakteristik keuangan dengan perilaku pajak perusahaan menunjukkan hasil empiris yang belum seragam. Marques dkk. (2024) menunjukkan bahwa variasi hasil penelitian mengenai CSR dan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh perbedaan proksi CSR, proksi *tax avoidance*, karakteristik sampel, serta model penelitian yang digunakan. Sejalan dengan itu, Mitroulia dkk. (2025) menegaskan bahwa hubungan ESG dan *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh perbedaan indikator, konteks penelitian, dan pendekatan ekonometrika. Keberagaman temuan tersebut

memperkuat kebutuhan pengujian yang lebih terfokus pada subsektor makanan dan minuman serta periode tertentu, agar bukti yang dihasilkan lebih spesifik, kontekstual, dan relevan bagi kepentingan akademik maupun kebijakan. Sebab itu, studi ini menguji pengaruh CSR dan GCG terhadap ETR pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan ROA dan DER sebagai variabel kontrol.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Noorprasetya dan Prasetya (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022	X: CSR, GCG yang diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit. Y: <i>Tax avoidance</i> Proksi Y: <i>Current ETR</i> .	CSR dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini relevan karena objek penelitian sama-sama perusahaan <i>food and beverage</i> di BEI dan menunjukkan bahwa tidak semua indikator GCG memberikan pengaruh yang sama terhadap perilaku pajak perusahaan.
2.	Laurencia dan Indarto (2025)	Determinasi GCG, CSR, <i>Capital Intensity</i> ,	X: GCG, CSR, <i>Capital</i>	GCG dan CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i>

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Terdaftar di BEI	<i>intensity, Leverage.</i> Y: <i>Tax avoidance.</i> Proksi Y: ETR.	<i>avoidance,</i> sedangkan <i>capital intensity</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance.</i> Hasil ini mendukung argumen bahwa tata kelola, pengungkapan sosial, dan karakteristik keuangan dapat memengaruhi variasi perilaku pajak perusahaan.
3.	Marques, Montenegro, dan Brás (2024)	<i>Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: A Meta-Analysis</i>	Variabel utama: CSR dan <i>tax avoidance.</i> Metode: <i>Meta-analysis.</i>	Kajian terhadap 117 estimasi dari 23 studi mengenai hubungan CSR dan <i>tax aggressiveness.</i> Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan proksi CSR, proksi <i>tax avoidance,</i> sampel, dan spesifikasi model dapat menjelaskan variasi temuan penelitian terdahulu. Studi ini penting untuk memperkuat research gap bahwa hubungan CSR dan <i>tax avoidance</i> masih belum konsisten.

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Dewi & Nustini (2024)	<i>Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi.</i>	X: CSR, Leverage, Capital Intensity, likuiditas. Y: Agresivitas Pajak. Moderasi: GCG.	Komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.
5.	Purba et al. (2024)	Penghindaran Pajak Sektor Makanan dan Minuman di Indonesia: Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage	X: profitabilitas, likuiditas, leverage. Y: penghindaran pajak.	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mendukung penggunaan ROA dan DER sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini,
6.	Assidi dkk (2022)	<i>The Nexus between Aggressive Tax Planning and Earnings Management in Different Political Systems and the Moderating Role of Corporate Governance</i>	X: aggressive tax planning, earnings management. Moderasi: corporate governance.	Corporate governance berperan dalam hubungan antara aggressive tax planning dan kualitas pelaporan perusahaan. Studi ini relevan untuk memperkuat dasar bahwa GCG dapat menjadi mekanisme

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				pengawasan terhadap keputusan pajak yang terlalu agresif.
7.	Drake dkk. (2020)	<i>Are Declining Effective Tax Rates Indicative of Tax Avoidance? Insight from Effective Tax Rate Reconciliations</i>	Variabel utama: ETR dan <i>tax avoidance</i> .	ETR sering digunakan untuk membaca perilaku pajak perusahaan, tetapi penurunan ETR tidak selalu secara langsung mencerminkan <i>tax avoidance</i> . Studi ini penting karena penelitian ini menggunakan ETR sebagai proksi kinerja pajak yang perlu ditafsirkan secara hati-hati.
8.	Schwab et al. (2022)	<i>What Determines Effective Tax Rates? The Relative Influence of Tax and Other Factors</i>	Variabel utama: ETR, faktor pajak, dan faktor nonpajak.	ETR dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak. Temuan ini relevan karena mendukung penggunaan variabel kontrol seperti ROA dan DER agar variasi ETR tidak keliru diatribusikan hanya pada CSR atau GCG.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran studi ini dibangun berdasar teori keagenan dan teori legitimasi untuk menjelaskan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Saat riset

ini, ETR ditempatkan sebagai variabel dependen, sedangkan CSR dan GCG sebagai variabel independen. Selain itu, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Return on Assets* (ROA) dipergunakan sebagai variabel kontrol. Studi ini ditempatkan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya teori keagenan dipakai guna memahami konflik kepentingan antara pemilik selaku *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pada konteks perpajakan, konflik tersebut dapat muncul ketika manajemen memiliki keleluasaan dalam mengelola beban pajak perusahaan.

ETR ialah rasio yang menggambarkan perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR bisa digunakan untuk melihat variasi beban pajak efektif anatarperusahaan maupun atarperiode. Namun, ETR yang rendah tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan pajak karena dapat dipengaruhi oleh faktor akuntansi, fiskal, dan karakteristik perusahaan. Hal ini searah dengan Christensen dkk. (2022) dan Schwab dkk. (2022) yang menegaskan bahwasanya ETR perlu ditafsirkan secara cermat. Sebab itu, ETR pada studi ini digunakan sebagai proksi posisi pajak perusahaan, bukan sebagai ukuran mutlak kepatuhan pajak.

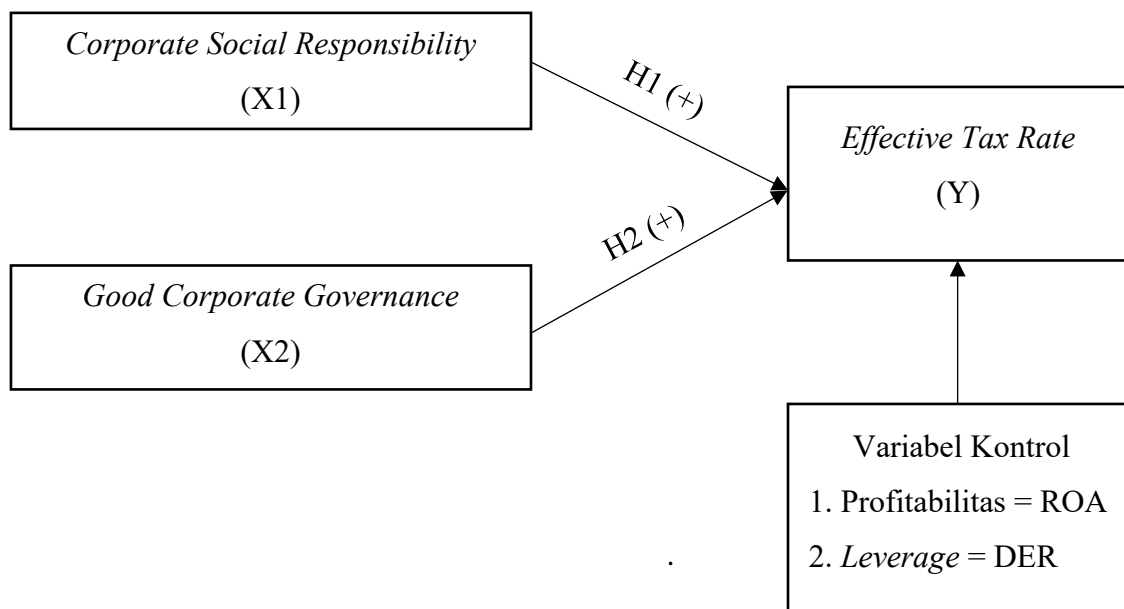
Berdasarkan teori keagenan, manajemen dapat memiliki dorongan untuk mengelola beban pajak karena pajak dipandang sebagai biaya yang dapat menurunkan laba bersih. Ketika laba menjadi dasar evaluasi kinerja, kompensasi, atau persepsi investor, manajemen dapat terdorong melakukan perencanaan pajak, baik yang masih sesuai ketentuan maupun yang lebih agresif. Alkausar dkk. (2020)

menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dipahami melalui perspektif teori keagenan sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.

CSR dan GCG diposisikan sebagai mekanisme yang dapat memengaruhi perilaku pajak perusahaan. CSR dipahami sebagai jalur legitimasi eksternal karena pengungkapan tanggung jawab sosial meningkatkan perhatian pemangku kepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Sementara itu, GCG dipahami sebagai mekanisme pengawasan internal yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap keputusan manajemen. KNKG (2021) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang ideal mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Dengan demikian, CSR dan GCG diperkirakan dapat memengaruhi tingkat ETR perusahaan.

Studi ini turut memanfaatkan DER dan ROA sebagai variabel kontrol. DER memberi gambaran terkait struktur pendanaan perusahaan lewat perbandingan utang dan ekuitas. Ross dkk. (2022) menjelaskan bahwa pemakaian utang bisa memunculkan beban bunga yang berdampak pada laba kena pajak, sehingga leverage dapat memengaruhi ETR. ROA dipakai guna mencerminkan kecakapan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipunya. Atrill dan McLaney (2023) menjelaskan bahwa ROA memperlihatkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk mendapat keuntungan. Oleh karena itu, DER dan ROA digunakan sebagai variabel kontrol agar pengaruh CSR dan GCG terhadap ETR dapat dianalisis dengan lebih tepat.

**Gambar 2.3 Model Konseptual**



Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

## 2.4 Hipotesis

Didasarkan kerangka pemikiran yang sudah disusun, studi ini merumuskan dua hipotesis sebagaimana di bawah.

### 2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan menjalankan aktivitasnya dalam kerangka hubungan sosial dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sebab itu, perusahaan butuh memberi kepastian bahwasanya kebijakan dan tindakannya selaras dengan nilai, norma, dan ekspektasi pemangku kepentingan agar legitimasi dapat diperoleh dan dipertahankan. Dalam konteks ini, pengungkapan CSR yang lebih luas menunjukkan upaya perusahaan untuk menampilkan akuntabilitas dan

tanggung jawab sosialnya kepada publik. *Global Reporting Initiative* (2022) menekankan bahwa sektor makanan dan minuman memiliki karakteristik dampak yang luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan rantai nilai, sehingga pengungkapan keberlanjutan menjadi penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Sejalan dengan itu, KPMG (2022b) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian karena pemangku kepentingan menuntut informasi yang lebih terbuka mengenai dampak sosial dan lingkungan perusahaan.

Berkaitan dengan ranah perpajakan, perusahaan yang lebih aktif mengungkapkan CSR cenderung berada dalam sorotan publik, investor, media, dan regulator. Kondisi tersebut membuat manajemen relatif lebih berhati-hati terhadap keputusan yang dapat memunculkan risiko reputasi, termasuk keputusan perpajakan yang tercermin dalam *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen. Pajak dapat dipandang sebagai bagian dari kontribusi perusahaan kepada negara dan masyarakat, sehingga kebijakan pajak yang terlalu agresif dapat menurunkan persepsi positif atas tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan sebutan lain, makin tinggi pengungkapan CSR, makin besar dorongan bagi perusahaan untuk menjaga kontribusinya pada tingkat yang lebih wajar, sehingga ETR tidak terlalu rendah dan relatif lebih mendekati tarif PPh Badan yang berlaku. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR digunakan untuk membaca variasi beban pajak efektif perusahaan, sedangkan KPMG (2022a) menekankan bahwa isu pajak juga berkaitan dengan risiko, tata kelola, dan persepsi pemangku kepentingan.

Secara empiris, kaitan antara CSR dan perilaku pajak masih memperlihatkan hasil yang beragam. Marques dkk. (2024) menunjukkan bahwa variasi hasil penelitian mengenai CSR dan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh perbedaan proksi CSR, proksi *tax avoidance*, karakteristik sampel, dan model penelitian yang digunakan. Sejalan dengan itu, Mitroulia dkk. (2025) menegaskan bahwa hubungan ESG dan *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh perbedaan indikator, konteks penelitian, serta pendekatan ekonometrika. Dalam konteks Indonesia, Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa CSR berpengaruh signifikan bagi *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang tercatat di BEI, sedangkan Laurencia dan Indarto (2025) melaporkan bahwasanya CSR memberi pengaruh negatif bagi *tax avoidance*. Karena *tax avoidance* yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan ETR yang lebih rendah, maka secara konseptual hubungan CSR dengan ETR diharapkan bersifat positif.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil riset terdahulu tersebut, makin tinggi pengungkapan CSR, makin besar dorongan perusahaan untuk menjaga kebijakan perpajakannya agar tetap akuntabel, dan tidak terlalu agresif. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih luas diharapkan punya ETR yang lebih tinggi. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya CSR tidak sebatas punya fungsi sebagai bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial, namun turut sebagai mekanisme legitimasi eksternal yang bisa memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ialah sebagaimana di bawah.

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **2.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)**

Didasarkan teori keagenan, pemisahan peran antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) bisa menghadirkan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya konflik keagenan timbul sebab manajemen sebagai pihak yang mengatur perusahaan tidak selalu memiliki kepentingan yang seutuhnya selaras dengan pemilik perusahaan. Dalam konteks perpajakan, manajemen memiliki dorongan untuk mengatur beban pajak karena pajak menekan laba setelah pajak dan dapat memengaruhi evaluasi kinerja, besaran kompensasi, serta persepsi pasar. Situasi ini membuka peluang bagi penerapan perencanaan pajak, mulai dari strategi yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan hingga strategi yang lebih agresif. Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa agresivitas pajak bisa dijelaskan lewat perspektif teori keagenan sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Sejalan dengan itu, Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa perbedaan strategi pajak perusahaan dapat tercermin dalam variasi nilai ETR antarperusahaan maupun antarperiode.

Pada kondisi tersebut, GCG punya peran sebagai mekanisme pengendalian internal yang bisa memberi batasan bagi tindakan oportunistik manajemen. Melalui

fungsi pengawasan serta prinsip akuntabilitas, GCG diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan yang lebih cermat, transparan, juga selaras dengan kepentingan jangka panjang perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam studi ini, GCG diprosikan melalui komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional karena ketiga mekanisme tersebut dipandang merepresentasikan kekuatan pengawasan internal dalam perusahaan. KNKG (2021) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang ideal mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Selain itu, OJK (2021) menekankan pentingnya fungsi organ tata kelola dalam memperkuat pengawasan dan kepatuhan perusahaan. Dalam konteks karakteristik perusahaan, Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dan kondisi internal perusahaan dapat berkaitan dengan perilaku pajak perusahaan.

Komisaris independen berperan dalam memberi pengawasan yang lebih objektif atas keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Komite audit punya peran dalam membantu pengawasan terhadap pelaporan keuangan, kepatuhan, serta kualitas pengendalian internal. Sementara itu, kepemilikan institusional mencerminkan potensi pengawasan dari investor institusional terhadap kebijakan perusahaan. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, penerapan GCG yang lebih kuat diharapkan dapat menekan kecenderungan manajemen untuk membuat perencanaan pajak yang terlalu agresif. Sebab itu, perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik diperkirakan punya ETR yang lebih tinggi karena mekanisme pengawasan dapat membatasi keputusan perpajakan yang terlalu agresif.

Secara empiris, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwasanya kualitas tata kelola perusahaan berkaitan dengan perilaku pajak, meskipun arah dan kekuatan pengaruhnya tidak selalu seragam pada setiap indikator. Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa komisaris independen memberi pengaruh signifikan bagi *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, sedangkan komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu, Laurencia dan Indarto (2025) melaporkan bahwa GCG memberi pengaruh negatif bagi *tax avoidance*, yang maknanya makin baik tata kelola perusahaan, kecenderungan perusahaan menghindari pajak cenderung menurun. Karena *tax avoidance* yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan ETR yang lebih rendah, maka semakin kuat penerapan GCG, semakin besar kemungkinan perusahaan menjaga posisi pajaknya pada tingkat yang lebih wajar. Didasarkan penjabaran teoritis disertai hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan dalam studi ini ialah sebagaimana di bawah.

H2: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi & Sampel**

##### **3.1.1 Populasi**

Sugiyono (2022) menyebut bahwasanya populasi adalah area generalisasi yang melingkupi objek atau subjek dengan kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti guna ditelaah dan kemudian dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Sekaran dan Bougie (2020) menegaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif, penetapan populasi harus dirumuskan secara tegas agar hasil penelitian dapat digeneralisasi secara tepat.

Populasi saat riset ini ialah seluruh perusahaan publik subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024. Mengingat riset ini memanfaatkan data sekunder berwujud data panel, maka unit analisis penelitian ialah perusahaan-tahun (*firm-year*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.

Penentuan sampel saat riset ini dilakukan dengan memanfaatkan metode *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan sampel berdasar kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan metode ini dilakukan agar perusahaan yang dianalisis punya kelengkapan data yang dibutuhkan untuk mengukur seluruh variabel penelitian secara konsisten selama periode 2021-2024.

Dengan demikian, populasi terjangkau (*accessible population*) dalam studi ini ialah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang memenuhi ketentuan berikut.

- a. Termasuk dalam subsektor makanan dan minuman berdasarkan klasifikasi sektor/subsektor BEI.
- b. Perusahaan punya data keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung *Effective Tax Rate* (ETR), *Return on Assets* (ROA), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) selama periode 2021-2024.
- c. Perusahaan memiliki data kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit selama periode 2021-2024
- d. Memiliki dokumen *Sustainability Report* selama periode 2021-2024 sehingga pengukuran CSR berbasis GRI *Disclosure*.
- e. Perusahaan memiliki data lengkap untuk seluruh variabel penelitian selama 2021-2024 sehingga data penelitian membentuk panel seimbang (*balanced panel*).
- f. Perusahaan memiliki laba sebelum pajak atau *profit before tax* (PBT) positif dan nilai ETR positif pada seluruh tahun pengamatan. Apabila perusahaan memiliki *profit before tax* (PBT)  $\leq 0$  atau ETR negatif pada salah satu tahun pengamatan, perusahaan tersebut tidak diikutkan sebagai sampel agar struktur data tetap berbentuk *balanced panel*.

Perusahaan yang tidak mencukupi kriteria tersebut tidak diikutsertakan dalam unit penelitian. Dengan demikian, populasi terjangkau menjadi dasar dalam penetapan sampel penelitian.

### **3.1.2 Sampel**

Sugiyono (2022) menyebut bahwasanya sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunya oleh populasi tersebut. Sampel dalam studi ini merupakan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang termasuk dalam populasi terjangkau dan memenuhi seluruh kriteria penelitian selama periode tahun 2021-2024.

Studi ini memanfaatkan panel seimbang (*balanced panel*), sehingga hanya perusahaan yang punya data lengkap selama empat tahun pengamatan yang dipertahankan sebagai sampel akhir. Dengan demikian, setiap perusahaan dalam sampel diamati periode yang sama, yaitu tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Berdasarkan proses seleksi data, sampel akhir penelitian terdiri atas perusahaan subsektor makanan dan minuman yang memenuhi kriteria kelengkapan data, memiliki laba sebelum pajak positif, juga memiliki data yang dapat digunakan untuk menghitung seluruh variabel penelitian secara konsisten selama periode pengamatan.

## **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Agar pengujian empiris dapat dilakukan secara konsisten dan terhindar dari perbedaan pemahaman, penelitian ini mendefinisikan setiap variabel secara

operasional yang mencakup konsep yang digunakan, rujukan ilmiah, cara pengukuran, serta prinsip pembacaan hasil ukurannya. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa variabel penelitian ialah segala perihal yang ditentukan oleh peneliti guna dipelajari sehingga menghasilkan informasi yang bisa dipergunakan dalam penarikan simpulan. Karena studi ini menguji hubungan antarvariabel pada data perusahaan-tahun (*firm-year*), definisi operasional diperlukan agar pengukuran antarperusahaan dan antartahun dapat dibandingkan secara wajar. Sebab demikian, setiap variabel saat penelitian ini perlu mempunyai batasan konsep serta indikator pengukuran yang jelas agar hasil analisis dapat diinterpretasikan secara konsisten.

Berdasarkan kerangka hubungan sebab-akibat, variabel dependen ialah variabel yang terpengaruh ataupun menjadi akibat dari adanya variabel independen. Studi ini menetapkan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR digunakan untuk mengukur perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak juga menggambarkan variasi beban pajak efektif antarperusahaan maupun antarperiode. Namun, Christensen dkk. (2022) dan Schwab dkk. (2022) menegaskan bahwa nilai ETR tetap perlu ditafsirkan secara hati-hati karena dapat bergerak akibat faktor akuntansi, fiskal dan karakteristik perusahaan. Sebab itu, ETR saat penelitian ini dipergunakan sebagai ukuran beban pajak efektif perusahaan, bukan sebagai ukuran mutlak kepatuhan pajak.

Penelitian ini menempatkan dua variabel utama yang diperkirakan berkaitan dengan variasi ETR, yaitu CSR dan GCG. Dalam perspektif pemerintah serta pemangku kepentingan, CSR dipahami sebagai kanal legitimasi dan tekanan

eksternal melalui keterbukaan informasi keberlanjutan, sedangkan GCG dipahami sebagai kanal kontrol internal melalui penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengambilan keputusan. KPMG (2022b) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih tinggi atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Sementara itu, KNKG (2021) menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang ideal menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Untuk kepentingan pengujian kuantitatif, CSR diproksikan melalui indeks pengungkapan CSR berbasis GRI (*GRI Disclosure Index*), sedangkan GCG dioperasionalkan melalui tiga mekanisme tata kelola, yakni komisaris independen (KIND), komite audit (KA), dan kepemilikan institusional (INST).

Selain variabel utama, studi ini mengikutsertakan leverage dan profitabilitas sebagai variabel kontrol karena keduanya relevan dalam menjelaskan posisi pajak efektif perusahaan. Leverage yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat berkaitan dengan variasi beban pajak efektif melalui struktur pendanaan dan beban bunga, sedangkan profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang menjadi basis pengenaan pajak. Ross dkk. (2022) memberi penjelasan bahwasanya penggunaan utang dapat memengaruhi struktur pendanaan perusahaan dan menimbulkan beban bunga. Sementara itu, Atrill dan McLaney (2023) menjelaskan bahwa rasio keuangan seperti profitabilitas dan leverage dapat membantu menilai kondisi kinerja serta struktur keuangan perusahaan. Dengan memasukkan ROA

serta DER sebagai variabel kontrol, interpretasi hubungan CSR dan GCG terhadap ETR diharapkan tidak bias akibat perbedaan kemampuan menghasilkan laba maupun struktur pendanaan antarperusahaan. Perihal ini searah dengan Schwab dkk. (2022) yang memperlihatkan bahwasanya karakteristik keuangan perusahaan perlu diperhatikan dalam menjelaskan variasi beban pajak efektif.

### 3.2.1 Variabel Dependen: *Effective Tax Rate (ETR)*

*Effective Tax Rate (ETR)* ialah rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak yang banyak dipergunakan untuk menggambarkan Tingkat beban pajak efektif perusahaan dalam suatu periode. Drake, Hamilton, dan Lusch (2020) menjelaskan bahwa ETR sering digunakan dalam penelitian perpajakan karena dapat menunjukkan variasi beban pajak efektif antarperusahaan maupun antarperiode. Sejalan dengan itu, Schwab dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR dapat dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak, sehingga penggunaannya perlu ditafsirkan secara hati-hati. Saat penelitian ini, ETR ditempatkan sebagai variabel dependen yang diperkirakan terpengaruh oleh CSR dan GCG, dengan ROA dan DER sebagai variabel kontrol.

ETR dihitung dengan memperbandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Rumus pengukuran ETR ialah sebagaimana di bawah.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Drake, Hamilton, dan Lusch (2020)

Untuk menjaga keterbandingan dan kewajaran interpretasi, observasi perusahaan-tahun dengan *profit before tax* (PBT)  $\leq 0$  dikeluarkan dari sampel karena ETR kurang representatif pada kondisi rugi. Selain itu, observasi dengan nilai ETR negatif juga dikeluarkan karena nilai tersebut menunjukkan adanya manfaat pajak atau beban pajak penghasilan negatif, sehingga kurang sesuai untuk membaca kewajaran beban pajak efektif perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini hanya menggunakan observasi dengan PBT positif dan ETR bernilai positif agar perhitungan ETR lebih stabil, wajar, dan dapat dibandingkan antarperusahaan maupun antartahun.

Pada penelitian ini, tarif umum PPh Badan sebesar 22% digunakan sebagai *benchmark* atau tarif *statutory*. Republik Indonesia (2021) menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22%, sehingga tarif tersebut digunakan sebagai dasar pembanding deskriptif tingkat ETR perusahaan. Namun, ETR yang berada di bawah atau di atas 22% tidak secara langsung menunjukkan ketidakpatuhan karena perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh insentif pajak, perbedaan akuntansi dan fiskal, penghasilan yang dikenakan pajak final, serta faktor lain yang sah. Oleh karena itu, ETR digunakan sebagai ukuran beban pajak efektif perusahaan dan bukan sebagai ukuran mutlak untuk menyatakan perusahaan patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

### **3.2.2 Variabel Independen: *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* CSR dipahami sebagai komitmen perusahaan guna mempertanggungjawabkan dampak ekonomi, sosial, dan

lingkungan serta meningkatkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan melalui praktik dan pengungkapan keberlanjutan. KPMG (2022b) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih tinggi terhadap dampak perusahaan. Sejalan dengan itu, Global Reporting Initiative (2023) menjelaskan bahwa GRI Standards digunakan untuk membantu organisasi mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, serta sosial secara lebih terstruktur, konsisten, juga bisa dibandingkan. Penelitian ini, CSR diprosikan melalui *GRI Disclosure Index* yang disusun dengan metode *content analysis* pada laporan keberlanjutan dan/atau laporan tahunan perusahaan. Tiap item GRI diberi skor 1 bila diungkapkan dan 0 bila tidak diungkapkan, sehingga skor CSR perusahaan-tahun dihitung sebagai proporsi item yang diungkapkan dari total item *checklist* yang dipergunakan. Adapun checklist pengungkapan CSR berbasis GRI yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel Checklist Pengungkapan CSR Berbasis GRI

No	Kategori	Item GRI yang Digunakan
1	Umum/Dasar	GRI 2 Pengungkapan Umum
2	Umum/Dasar	GRI 3 Topik Material
3	Ekonomi	GRI 201 Kinerja Ekonomi
4	Ekonomi	GRI 202 Kehadiran Pasar
5	Ekonomi	GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung
6	Ekonomi	GRI 204 Praktik Pengadaan
7	Ekonomi	GRI 205 Anti Korupsi
8	Ekonomi	GRI 206 Perilaku Anti Persaingan
9	Ekonomi	GRI 207 Pajak
10	Lingkungan	GRI 101 Keanekaragaman Hayati
11	Lingkungan	GRI 102 Perubahan Iklim

No	Kategori	Item GRI yang Digunakan
12	Lingkungan	GRI 103 Energi / Pengelolaan Energi
13	Lingkungan	GRI 301 Material
14	Lingkungan	GRI 302 Energi
15	Lingkungan	GRI 303 Air
16	Lingkungan	GRI 305 Emisi
17	Lingkungan	GRI 306 Limbah
18	Lingkungan	GRI 306 Efluen dan Limbah
19	Lingkungan	GRI 308 Penilaian Lingkungan Pemasok
20	Masyarakat / Sosial	GRI 401 Ketenagakerjaan
21	Masyarakat / Sosial	GRI 402 Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen
22	Masyarakat / Sosial	GRI 403 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
23	Masyarakat / Sosial	GRI 404 Pelatihan dan Pendidikan
24	Masyarakat / Sosial	GRI 405 Keberagaman dan Kesempatan Kerja
25	Masyarakat / Sosial	GRI 406 Non Diskriminasi
26	Masyarakat / Sosial	GRI 407 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
27	Masyarakat / Sosial	GRI 408 Pekerja Anak
28	Masyarakat / Sosial	GRI 409 Kerja Paksa atau Wajib Kerja
29	Masyarakat / Sosial	GRI 410 Praktik Keamanan
30	Masyarakat / Sosial	GRI 411 Hak-Hak Masyarakat Adat
31	Masyarakat / Sosial	GRI 413 Masyarakat/Komunitas Lokal
32	Masyarakat / Sosial	GRI 414 Penilaian Sosial Pemasok
33	Masyarakat / Sosial	GRI 415 Kebijakan Publik
34	Masyarakat / Sosial	GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
35	Masyarakat / Sosial	GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan
36	Masyarakat / Sosial	GRI 418 Privasi Pelanggan

Sumber: *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*, diolah peneliti.

Rumus pengukuran CSR ialah sebagaimana di bawah:

$$CSR_{it} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_{36}}{36}$$

Sumber: *GRI Disclosure Index* dengan metode *content analysis*.

Keterangan:

$CSR_{it}$  = indeks pengungkapan CSR perusahaan i pada tahun t.

$X_1$  samapai  $X_{36}$  = skor item GRI, yaitu 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan.

36 = jumlah total item checklist GRI yang digunakan.

Cara baca CSR (GRI *Disclosure Index*) :

- a. CSR (GRI *Disclosure Index*) = indeks yang mengukur kelengkapan pengungkapan CSR/keberlanjutan berdasarkan item GRI *Standards* (hasil *content analysis* laporan keberlanjutan dan/atau laporan tahunan).
- b. Rentang nilai: 0-1 (atau 0-100%).
  1. 0 = tidak/nyaris tidak mengungkap item acuan.
  2. 1 (100%) = mengungkap hampir seluruh item acuan.

Cara baca nilai tinggi:

- a. Indeks lebih tinggi *disclosure* lebih lengkap dan lebih transparan (lebih banyak item GRI diungkap)
- b. Visibilitas & tekanan eksternal (investor/regulator/media) lebih kuat, secara teori mendorong kehati-hatian pada keputusan sensitif reputasi, termasuk kebijakan/perilaku pajak.

Cara baca nilai rendah:

- a. Indeks lebih rendah *disclosure* lebih terbatas (lebih sedikit item diungkap).
- b. Visibilitas & tekanan eksternal relatif lebih lemah dorongan reputasional dari *disclosure* untuk kehati-hatian (termasuk pajak) lebih kecil.

Indeks GRI mengukur kelengkapan pengungkapan (*disclosure*), bukan kualitas/keberhasilan program CSR, sehingga “CSR tinggi” di penelitian ini berarti lebih banyak item GRI yang diungkapkan, bukan otomatis dampaknya lebih baik.

### **3.2.3 Variabel Independen: *Good Corporate Governance* (GCG)**

*Good Corporate Governance* (GCG) ialah sistem tata kelola yang dipergunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, juga mengawasi perusahaan berdasar prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. KNKG (2021) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan agar pengambilan keputusan berjalan secara terbuka, bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Dalam perspektif teori keagenan, mekanisme GCG berfungsi guna mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik perusahaan bersama manajemen melalui penguatan fungsi pengawasan.

Pada perusahaan publik, penerapan tata kelola juga berkaitan dengan kerangka regulasi yang mengatur keterbukaan informasi dan struktur pengawasan perusahaan. OJK (2021) mengatur bentuk serta isi laporan tahunan emiten ataupun perusahaan publik, termasuk pengungkapan tata kelola perusahaan. Dari sudut pandang pemerintah, penguatan tata kelola relevan untuk mempersempit ruang pengambilan keputusan yang oportunistik dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, termasuk pada area yang kompleks seperti perpajakan. Sejalan dengan itu, Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dapat berkaitan

dengan perilaku pajak perusahaan karena tata kelola berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajerial.

Berkaitan konteks perpajakan, mekanisme tata kelola relevan karena keputusan pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh insentif manajerial dan ruang diskresi dalam pelaporan. Laurencia dan Indarto (2025) menunjukkan bahwa GCG memberi pengaruh negatif bagi *tax avoidance*, yang berarti makin baik tata kelola perusahaan, makin rendah kecenderungan perusahaan menghindari pajak. Berdasarkan uraian tersebut, GCG digunakan sebagai variabel independen untuk menganalisis pengaruh mekanisme pengawasan internal terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Pada studi ini, GCG diukur memakai indeks komposit yang dibentuk dari tiga mekanisme tata kelola perusahaan, yakni komisaris independen (KIND), komite audit (KA), serta kepemilikan institusional (INST). Ketiga indikator tersebut digunakan karena secara konseptual merepresentasikan kekuatan pengawasan internal perusahaan. Komisaris independen mencerminkan independensi fungsi pengawasan pada tingkat dewan komisaris, komite audit mencerminkan kapasitas pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan kepatuhan perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional mencerminkan potensi monitoring dari pemegang saham institusional terhadap tindakan manajemen.

Agar ketiga indikator tersebut dapat digabungkan ke dalam satu ukuran komposit, masing-masing indikator dinormalisasi terlebih dahulu. Normalisasi dilakukan agar indikator yang memiliki skala berbeda dapat dibandingkan secara seimbang. Setelah dinormalisasi, nilai GCG dihitung dengan merata-ratakan nilai

komisaris independen, komite audit, juga kepemilikan institusional yang telah dinormalisasi.

Rumus pengukuran GCG ialah sebagaimana di bawah.

$$GCG = \frac{KIND_N + KA_N + INST_N}{3}$$

Sumber: OECD/European Union/EC-JRC (2008).

GCG diprosikan menggunakan indeks komposit GCG yang dibentuk dari komisaris independen (KIND), komite audit (KA), serta kepemilikan institusional (INST).

- a. Nilai GCG yang lebih tinggi memperlihatkan bahwasanya mekanisme tata kelola perusahaan relatif lebih kuat. Hal ini mencerminkan kombinasi proporsi komisaris independen, komite audit, juga kepemilikan institusional yang lebih tinggi setelah dinormalisasi, sehingga fungsi pengawasan internal perusahaan dinilai lebih kuat.
- b. Nilai GCG yang lebih rendah memperlihatkan bahwasanya mekanisme tata kelola perusahaan relatif lebih lemah. Hal ini mencerminkan kombinasi proporsi komisaris independen, komite audit, juga kepemilikan institusional yang lebih rendah setelah dinormalisasi, sehingga fungsi pengawasan internal perusahaan relatif lebih terbatas.
- c. Dalam konteks perpajakan, GCG digunakan sebagai variabel independen karena mekanisme tata kelola yang lebih kuat secara teoritis dapat

memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajerial, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pajak perusahaan.

#### **3.2.4 Variabel Kontrol: *Leverage* (DER)**

Leverage ialah ukuran struktur pendanaan yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam pendanaan relatif terhadap ekuitas. Salah satu ukuran yang lazim digunakan adalah DER, yakni rasio yang membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan. Ross dkk. (2022) memberi penjelasan bahwasanya pemakaian utang dalam struktur pendanaan dapat memengaruhi risiko keuangan perusahaan. Sejalan dengan itu, Atrill dan McLaney (2023) menempatkan rasio leverage sebagai indikator yang dipakai guna menilai struktur pembiayaan serta kecakapan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya.

Dari sudut pandang pemerintah, struktur pendanaan relevan karena dapat memengaruhi beban pajak efektif melalui perlakuan fiskal atas biaya pendanaan, khususnya bunga. Pemakaian utang bisa memunculkan beban bunga yang pada kondisi tertentu bisa mengurangi laba kena pajak, sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang berbeda bisa mempunyai ETR yang berbeda pula. Oleh karena itu, leverage perlu dikontrol dalam penelitian yang menggunakan ETR karena perbedaan tingkat utang antarperusahaan dapat memengaruhi variasi beban pajak efektif yang dilaporkan. Perihal ini searah dengan Schwab dkk. (2022) yang memperlihatkan bahwasanya karakteristik keuangan perusahaan perlu diperhatikan dalam menjelaskan variasi beban pajak efektif.

DER dihitung dengan rumus sebagaimana di bawah.

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber: Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., & Jordan, B. D. (2022). *Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.

- a. Nilai DER yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan pendanaan pada utang relatif lebih besar dibanding ekuitas sehingga beban kewajiban tetap (pokok/bunga) dan risiko keuangan cenderung meningkat.
- b. Nilai DER yang lebih rendah menunjukkan struktur pendanaan lebih banyak ditopang ekuitas sehingga ketergantungan pada utang relatif lebih kecil. DER digunakan sebagai variabel kontrol karena struktur utang dapat berkaitan dengan beban pajak melalui mekanisme biaya bunga (*tax shield*) dan berpotensi memengaruhi variasi ETR, sehingga hubungan CSR/GCG terhadap ETR tidak bias oleh perbedaan struktur pendanaan.

### 3.2.5 Variabel Kontrol: Profitabilitas (ROA)

*Return on Assets* (ROA) ialah rasio profitabilitas yang memperlihatkan kecakapan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dipunya.

ROA dihitung dengan rumus sebagaimana di bawah.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., & Jordan, B. D. (2022).

*Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.

- a. ROA yang lebih tinggi memperlihatkan aset perusahaan lebih produktif menghasilkan laba.
- b. ROA yang lebih rendah memperlihatkan kemampuan menghasilkan laba dari aset relatif lebih kecil.

ROA digunakan sebagai variabel kontrol agar variasi ETR tidak keliru diatribusikan pada CSR atau GCG, padahal variasi tersebut dapat terpengaruh oleh perbedaan kecakapan perusahaan dalam mendapat laba. Ross dkk. (2022) menjelaskan bahwa ROA menggambarkan kecakapan perusahaan menghasilkan laba lewat pemanfaatan aset yang dipunya. Dengan demikian, ROA relevan untuk dikendalikan karena tingkat profitabilitas dapat memengaruhi kapasitas laba yang menjadi dasar pengenaan pajak perusahaan.

Selain itu, Schwab dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR dapat dipengaruhi oleh faktor pajak maupun nonpajak, termasuk karakteristik perusahaan. Sejalan dengan itu, Christensen dkk. (2022) menjelaskan bahwa interpretasi ETR perlu mempertimbangkan faktor-faktor akuntansi dan fiskal yang dapat memengaruhi besaran beban pajak efektif. Oleh karena itu, ROA perlu dikendalikan dalam model penelitian agar pengaruh CSR dan GCG terhadap ETR dapat dianalisis dengan lebih tepat.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel (*firm-year*) periode 2021-2024. Sumber data studi berasal dari dua kelompok utama, yakni data keuangan dan tata kelola Perusahaan, serta data pengungkapan CSR/keberlanjutan.

Data keuangan diperoleh melalui Bloomberg Terminal, meliputi *pretax income* atau *profit before tax* (PBT), *tax expense*, Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), serta data kepemilikan institusional. Data tersebut digunakan untuk menghitung ETR, variabel kontrol, serta salah satu komponen pembentuk indeks komposit GCG.

Data tata kelola perusahaan diperoleh dari *Annual Report*, terutama informasi mengenai komisaris independen dan komite audit. Sementara itu, data pengungkapan CSR diperoleh dari *Sustainability Report* dan/atau *Annual Report* perusahaan yang dikeluarkan lewat Bursa Efek Indonesia (BEI) dan/atau situs resmi perusahaan. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan GRI *Disclosure Index* dalam pengukuran CSR. Adapun sumber data saat penelitian ini ialah sebagaimana di bawah.

- a. Bloomberg Terminal, sebagai sumber data keuangan yang meliputi *profit before tax* (PBT), *tax expense*, ROA, DER, dan kepemilikan institusional.
- b. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan/atau situs resmi perusahaan, sebagai sumber dokumen publik berupa *Annual Report* dan/atau *Sustainability Report* yang dipakai guna mendapat data CSR, komisaris independen, dan komite audit.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Studi ini memanfaatkan metode dokumentasi dengan memakai data sekunder yang bersumber dari Bloomberg Terminal dan laporan tahunan (*Annual Report*), serta laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi data keuangan, data tata kelola, data kepemilikan, serta data pengungkapan keberlanjutan yang relevan dengan variabel penelitian.

Adapun tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi emiten subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI untuk periode observasi 2021-2024.
- b. Mengumpulkan data keuangan melalui Bloomberg Terminal, meliputi beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak, *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), serta data kepemilikan institusional.
- c. Mengumpulkan *Annual Report* perusahaan untuk memperoleh data komisaris independen dan komite audit.
- d. Memanfaatkan *Sustainability Report* sebagai sumber data untuk pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- e. Mengukur CSR memakai *GRI Disclosure Index* melalui metode *content analysis*, yakni dengan memberi skor 1 apabila item GRI diungkapkan serta skor 0 apabila item tidak diungkapkan.
- f. Menghitung GCG sebagai indeks komposit yang dibentuk dari komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional. Ketiga indikator

tersebut dinormalisasi terlebih dahulu, kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai GCG komposit.

- g. Menyusun seluruh data ke dalam bentuk data panel perusahaan-tahun (*firm-year*) dan memeriksa kelengkapan serta konsistensi data sebelum dianalisis.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Guna menguji sejumlah variabel yang menjadi objek penelitian, digunakan beberapa metode analisis. Metode tersebut diantaranya :

#### **3.5.1 Uji Statistik Deskriptif**

Studi ini memanfaatkan statistik deskriptif sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan karakteristik data penelitian. Ghazali (2021) menjelaskan bahwa statistik deskriptif dipergunakan untuk memberi gambaran ataupun deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rerata (*mean*), serta standar deviasi. Pada tahap ini, statistik deskriptif dipergunakan untuk menghitung nilai minimum, maksimum, *mean*, serta standar deviasi dari variabel *Effective Tax Rate* (ETR), *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diprosikan dengan *GRI Disclosure Index*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Return on Assets* (ROA).

Hasil uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi umum ETR, tingkat pengungkapan CSR berbasis GRI, indeks komposit GCG, leverage, dan profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024.

### 3.5.2 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dipakai guna menguji pengaruh variabel independen bagi variabel dependen dengan menggabungkan data lintas perusahaan (*cross-section*) serta data runtut waktu (*time series*). Saat riset ini, data yang dipergunakan berbentuk panel karena mencakup perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Wooldridge (2020) menjelaskan bahwa regresi data panel dapat dipakai untuk menganalisis data yang memiliki dimensi individu dan waktu. Sejalan dengan itu, Baltagi (2021) menyatakan bahwa model data panel memungkinkan peneliti mempertimbangkan variasi antarindividu dan antarwaktu dalam proses estimasi.

Estimasi awal dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *Panel Least Squares*. Model regresi dipakai guna menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), dengan *Return on Assets* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel kontrol.

Hasil pengujian diagnostik menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada dimensi *cross-section*. Oleh karena itu, estimasi akhir dilakukan menggunakan *Panel Estimated Generalized Least Squares* (Panel EGLS) dengan *cross-section weights*. Penggunaan Panel EGLS dimaksudkan untuk mengakomodasi perbedaan varians residual antarperusahaan sehingga hasil estimasi lebih sesuai dengan karakteristik data panel penelitian.

Model regresi data panel yang dipakai dirumuskan sebagaimana di bawah.

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 GCG_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 DER_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

1.  $ETR_{it}$  : *Effective Tax Rate*  $i$  pada tahun  $t$
2.  $CSR_{it}$  : *GRI Disclosure Index*  $i$  pada tahun  $t$
3.  $GCG_{it}$  : Indeks komposit tata kelola perusahaan  $i$  pada tahun  $t$
4.  $ROA_{it}$  : *Return on Assets* perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  sebagai ukuran profitabilitas
5.  $DER_{it}$  : *Debt to Equity Ratio* perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  sebagai ukuran leverage
6.  $\alpha$  : Konstanta
7.  $\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien regresi masing-masing variabel
8.  $\varepsilon_{it}$  : error term

Model regresi tersebut dipakai guna menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG) bagi *Effective Tax Rate* (ETR), disertai ROA dan DER sebagai variabel kontrol. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, penelitian ini melaksanakan uji diagnostik untuk mengetahui karakteristik model regresi. Uji diagnostik melingkupi uji normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ghazali (2021)

menjelaskan bahwasanya pelaksanaan uji diagnostik diperlukan agar hasil estimasi regresi bisa diinterpretasikan secara tepat.

Pemeriksaan multikolinearitas diadakan guna mengetahui apakah terdapat kaitan yang terlampau kuat antarvariabel independen dalam model. Pelaksanaan uji dilakukan menggunakan matriks korelasi antara CSR, GCG, ROA, dan DER. Model dinyatakan tidak memiliki indikasi multikolinearitas bila nilai koefisien korelasi antarvariabel tidak melampaui 0,80. Kebalikannya, nilai korelasi yang melampaui 0,80 menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas.

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas diadakan guna mengetahui apakah residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Ghazali (2021) menjelaskan bahwa uji normalitas dipakai guna menguji apakah variabel residual dalam model regresi punya distribusi normal. Normalitas residual umumnya dipergunakan sebagai bagian dari uji diagnostik sebelum interpretasi uji signifikansi koefisien, terutama agar hasil pengujian statistik dapat dibaca secara lebih tepat.

Pada studi ini, uji normalitas dilaksanakan memakai uji *Jarque-Bera* pada residual model. Kriteria pengambilan keputusan adalah bila nilai probabilitas *Jarque-Bera* melampaui 0,05, maka residual dianggap berdistribusi normal. Kebalikannya, bilamana nilai probabilitas tidak melampaui 0,05, maka residual dianggap tidak berdistribusi normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diadakan guna mengetahui apakah terdapat kaitan yang terlalu kuat antarvariabel independent dan variabel kontrol dalam model. Pelaksanaan uji diadakan dengan melihat matriks korelasi antara CSR, GCG, ROA, dan DER. Model dinyatakan tidak memiliki indikasi multikolinearitas bila nilai koefisien korelasi antarvariabel tidak melampaui 0,80. Kebalikannya, nilai korelasi yang melampaui 0,80 menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas.

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diadakan guna menilai apakah varians residual dalam model regresi punya sifat konstan ataupun berbeda pada setiap pengamatan. Pada penelitian dengan data panel, heteroskedastisitas dapat terjadi baik pada dimensi antarperusahaan maupun antarperiode. Sebab itu, pengujian heteroskedastisitas saat penelitian ini dilakukan dengan pendekatan uji heteroskedastisitas panel, yaitu *Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test*.

Model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas bila nilai probabilitas pengujian melampaui tingkat signifikansi 0,05. Kebalikannya, bila nilai probabilitas tidak melampaui 0,05, maka model mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Apabila ditemukan gejala heteroskedastisitas pada dimensi *cross-section*, maka estimasi model dapat disesuaikan menggunakan *Panel EGLS dengan cross-section weights* agar hasil estimasi lebih sesuai dengan karakteristik data panel yang digunakan.

#### **3.5.2.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi diadakan guna mengetahui apakah terdapat korelasi antarresidual pada pengamatan yang berurutan, utamanya pada data deret waktu ataupun data panel. Ghozali (2021) menjelaskan bahwa autokorelasi muncul ketika residual pada suatu periode berkorelasi dengan residual pada periode lampau. Dalam penelitian berbasis data panel, pemeriksaan autokorelasi penting dilakukan karena data memiliki dimensi waktu, yaitu periode 2021-2024.

Satu di antara sejumlah prosedur yang kerap dipakai untuk mendeteksi autokorelasi ialah uji Durbin-Watson. Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji Durbin-Watson dipergunakan untuk mendeteksi ada ataupun tidaknya autokorelasi, khususnya autokorelasi orde pertama. Nilai statistik Durbin-Watson berada pada rentang 0 sampai 4, dengan nilai yang mendekati 2 memperlihatkan tidak adanya autokorelasi.

Nilai yang mendekati 0 memberi indikasi autokorelasi positif, sedangkan nilai yang mendekati 4 mengindikasikan autokorelasi negatif. Dengan demikian, model regresi dinyatakan tidak mengalami masalah autokorelasi bila nilai hasil pengujian statistik Durbin-Watson berada pada kisaran yang menunjukkan tidak adanya korelasi antarresidual.

#### **3.5.3 Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi**

Setelah model regresi diuji melalui tahapan diagnostik, berikutnya dilakukan pengujian hipotesis dan pengukuran koefisien determinasi. Pelaksanaan uji ini terdiri atas uji F, koefisien determinasi, dan uji t.

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dipakai guna mengetahui benarkah variabel CSR, GCG, ROA, dan DER secara bersama-sama berpengaruh signifikan bagi ETR. Model dinyatakan signifikan secara simultan bila nilai Prob(F-statistic) tidak melampaui 0,05.

2. Koefisien Determinasi ( $R^2$  dan Adjusted  $R^2$ )

Koefisien determinasi dipakai guna mengetahui besarnya variasi ETR bisa dijelaskan oleh CSR, GCG, DER, dan ROA. Nilai *Adjusted R-squared* sebagai acuan utama karena telah memperhitungkan jumlah variabel dalam model.

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dipakai guna mengetahui pengaruh tiap variabel CSR, GCG, DER, dan ROA bagi ETR secara parsial. Variabel dinyatakan memberi pengaruh signifikan bila nilai probabilitas tidak melampaui 0,05. Arah pengaruh dilihat dari tanda koefisien regresi, yaitu positif atau negatif.

Hasil uji F, koefisien determinasi, serta uji t kemudian diinterpretasikan serta dihubungkan dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh CSR, GCG, ROA, dan DER bagi ETR pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Objek riset ini ialah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024. Pemilihan subsektor makanan dan minuman didasarkan pada karakteristik industri yang punya kontribusi penting bagi aktivitas ekonomi, bersentuhan langsung dengan konsumen, serta memiliki eksposur sosial dan lingkungan yang tinggi. Kondisi tersebut membuat perusahaan pada subsektor ini relevan untuk dianalisis dari sisi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Effective Tax Rate* (ETR). Saat riset ini, ETR ditempatkan sebagai variabel dependen yang menggambarkan perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. ETR dapat dipergunakan untuk mengamati variasi beban pajak efektif antarperusahaan maupun antartahun, tetapi tidak digunakan sebagai ukuran mutlak untuk menentukan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan (Drake dkk., 2020; Schwab dkk., 2022).

Data riset didapat dari laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan keberlanjutan perusahaan yang tersedia untuk periode 2021-2024. Variabel CSR diukur menggunakan *GRI Disclosure Index*, sedangkan GCG diukur sebagai indeks komposit yang disusun dari indikator komisararis independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Variabel ROA dan DER digunakan sebagai variabel

kontrol karena profitabilitas dan struktur pendanaan dapat memengaruhi beban pajak efektif perusahaan. Penggunaan data panel dilakukan karena penelitian ini menggabungkan dimensi waktu dan dimensi perusahaan, sehingga setiap observasi merepresentasikan satu perusahaan pada satu tahun tertentu. Data panel dinilai sesuai karena memungkinkan peneliti membaca variasi ETR pada perusahaan yang sama dari tahun ke tahun sekaligus membandingkan variasi antarperusahaan (Wooldridge, 2020; Baltagi, 2021).

Penyaringan sampel dilakukan dengan memperhatikan kriteria penelitian yang sudah dijabarkan pada Bab III. Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak atau *profit before tax* (PBT) kurang dari atau sama dengan nol maupun nilai ETR negatif pada salah satu tahun pengamatan dikeluarkan dari sampel. Apabila kondisi tersebut ditemukan pada salah satu tahun pengamatan, seluruh observasi perusahaan tersebut dikeluarkan agar struktur data tetap berbentuk panel seimbang (*balanced panel*). Setelah proses penyaringan, sampel akhir terdiri atas 24 perusahaan selama empat tahun pengamatan sehingga didapat 96 observasi (Data diolah penulis, 2026).

**Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Observasi
1	Perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam data awal periode 2021-2024	33	132
2	Perusahaan yang memiliki <i>profit before tax</i> (PBT) atau ETR negatif pada salah satu tahun pengamatan	(9)	(36)
3	Perusahaan yang memenuhi kriteria akhir dan digunakan dalam analisis	24	96

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwasanya jumlah perusahaan awal dalam data penelitian adalah 33 perusahaan dengan total 132 observasi. Berdasarkan proses penyaringan, terdapat sembilan perusahaan yang dikeluarkan karena memiliki *profit before tax* (PBT) kurang dari atau sama dengan nol maupun ETR negatif pada salah satu tahun pengamatan. Pengeluaran dilakukan terhadap seluruh observasi perusahaan agar struktur data tetap berbentuk *balanced panel*. Dengan demikian, sampel akhir terdiri atas 24 perusahaan selama empat tahun pengamatan dengan jumlah 96 observasi (Data diolah penulis, 2026).

#### 4.2 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif dipergunakan untuk melihat nilai minimum, maksimum, rerata, juga standar deviasi dari tiap variabel penelitian. Variabel yang dianalisis melingkupi ETR sebagai variabel dependen, CSR dan GCG sebagai variabel independen, juga ROA dan DER sebagai variabel kontrol. Pemeriksaan statistik deskriptif dilakukan guna memberi gambaran mengenai karakteristik dan sebaran data sebelum pengujian regresi dilakukan (Data diolah penulis, 2026).

**Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistika Deskriptif**

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.	Obs.
ETR	22,32162	21,59870	55,14150	1,95890	5,071380	96
CSR	0,600694	0,652778	0,861111	0,027778	0,178309	96
GCG	0,426510	0,425899	0,706515	0,314815	0,094851	96
ROA	11,55425	10,33685	33,48700	0,18640	8,011703	96
DER	28,23041	10,20860	175,28800	0,00660	38,60926	96

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan bahwasanya variabel ETR punya nilai rerata sejumlah 22,32162% disertai nilai minimum 1,95890% dan nilai

maksimum 55,14150%. Rerata ETR tersebut berada dekat dengan tarif PPh Badan sebesar 22%. Namun, kedekatan tersebut hanya digunakan sebagai perbandingan deskriptif dan tidak secara langsung menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan. Standar deviasi ETR sebesar 5,071380 menunjukkan adanya variasi beban pajak efektif antarperusahaan selama periode penelitian. ETR tetap perlu ditafsirkan secara hati-hati karena dapat dipengaruhi oleh faktor pajak maupun nonpajak, seperti perbedaan akuntansi dan fiskal, insentif pajak, serta karakteristik perusahaan (Christensen dkk., 2022; Schwab dkk., 2022).

Variabel CSR punya nilai rerata di angka 0,600694 disertai nilai minimum 0,027778 dan nilai maksimum 0,861111. Nilai rerata tersebut memperlihatkan bahwasanya pengungkapan CSR berbasis *GRI Disclosure Index* pada perusahaan sampel berada pada tingkat sedang menuju tinggi. Perusahaan dengan nilai CSR mendekati 0,861111 dapat diinterpretasikan punya tingkat pengungkapan yang lebih lengkap dibanding perusahaan dengan nilai CSR rendah. Variabel GCG punya nilai rerata di angka 0,426510 disertai nilai minimum 0,314815 dan nilai maksimum 0,706515. Nilai tersebut memperlihatkan bahwasanya indeks komposit GCG memiliki variasi antarperusahaan. Meskipun sebarannya relatif tidak ekstrem karena standar deviasi GCG hanya sebesar 0,094851. Pengukuran CSR dan GCG dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai penilaian kualitas substantif program, tetapi sebagai pengukuran kuantitatif atas tingkat pengungkapan dan mekanisme tata kelola yang tersedia dalam data penelitian. Pengukuran CSR mengacu pada kerangka pengungkapan keberlanjutan, sedangkan GCG mengacu pada prinsip tata

kelola perusahaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran (*Global Reporting Initiative, 2022; KNKG, 2021*).

Variabel ROA punya nilai rerata sejumlah 11,55425 disertai nilai minimum 0,18640 dan nilai maksimum 33,48700. Nilai tersebut memperlihatkan bahwasanya perusahaan dalam sampel akhir secara umum memiliki kemampuan menghasilkan laba dari aset yang positif selama periode pengamatan. ROA yang positif menjadi penting karena profitabilitas berhubungan dengan kapasitas laba yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Variabel DER punya nilai rerata di angka 28,23041 disertai nilai minimum 0,00660 juga nilai maksimum 175,28800. Perbedaan antara nilai minimum dan maksimum DER memperlihatkan adanya variasi struktur pendanaan antarperusahaan, meskipun tidak lagi terdapat nilai negatif setelah proses penyaringan sampel. Struktur pendanaan perlu diperhatikan karena penggunaan utang dapat memengaruhi risiko keuangan dan beban bunga perusahaan. Dalam konteks perpajakan, leverage juga relevan karena struktur pendanaan dapat berkaitan dengan variasi beban pajak efektif perusahaan (*Ross dkk., 2022; Purba dkk., 2024*).

### **4.3 Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk menguji pengaruh CSR dan GCG terhadap ETR dengan ROA dan DER sebagai variabel kontrol. Tahapan analisis meliputi uji asumsi klasik, estimasi regresi linier berganda dengan pendekatan data panel, juga pelaksanaan uji hipotesis. Uji asumsi klasik dipergunakan untuk menilai kelayakan

model melalui uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Sesudah itu, regresi digunakan untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh tiap variabel bagi ETR. Pelaksanaan uji hipotesis diadakan lewat uji F, koefisien determinasi, serta uji t agar hasil analisis dapat disajikan secara runtut, mulai dari kelayakan model secara simultan sampai pengaruh tiap variabel secara parsial (Ghozali, 2021; Hair dkk., 2021).

#### **4.3.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik diadakan guna memberi kepastian bahwa model regresi memiliki dasar pengujian yang memadai sebelum hasil regresi digunakan untuk menarik kesimpulan. Pemeriksaan asumsi klasik saat riset ini melingkupi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. Uji normalitas digunakan untuk melihat distribusi residual. Uji multikolinieritas dipergunakan untuk menilai apakah variabel independen punya kaitan yang terlampau kuat satu sama lain. Uji heteroskedastisitas dipergunakan untuk mengidentifikasi kesamaan ataupun perbedaan varians residual, sedangkan uji autokorelasi digunakan untuk melihat keterkaitan residual antarperiode. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar interpretasi koefisien regresi tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa melihat karakteristik model (Ghozali, 2021; Hair dkk., 2021).

#### 4.3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas residual dilaksanakan dengan memanfaatkan uji *Jarque-Bera*. Uji ini tujuannya guna menilai apakah *residual* model regresi menyebar mengikuti distribusi normal. Kriteria yang dipergunakan adalah nilai probabilitas. Bila nilai probabilitas melampaui 0,05, *residual* dinyatakan berdistribusi normal. Bilamana nilai probabilitas tidak melampaui 0,05, *residual* dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas saat penelitian ini diperlihatkan lewat Tabel 4.3 (Ghozali, 2021).

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Residual**

Keterangan	Nilai
<i>Jarque-Bera</i>	1834,939
<i>Probability</i>	0,000000
Observasi	96
Keputusan	<i>Residual</i> tidak berdistribusi normal

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwasanya nilai *Jarque-Bera* di angka 1834,939 disertai nilai probabilitas di angka 0,000000. Nilai probabilitas tersebut tidak melampaui 0,05, sehingga residual model regresi tidak berdistribusi normal. Keadaan ini dapat terjadi sebab data keuangan perusahaan memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya simetris, terutama pada variabel DER dan ETR yang masih memiliki rentang nilai cukup lebar meskipun data negatif sudah dikeluarkan.

Ketidaknormalan residual tidak secara otomatis membuat model tidak dapat digunakan. Menurut Wooldridge (2020), normalitas residual bukan merupakan syarat utama untuk memperoleh estimator yang konsisten, tetapi lebih berkaitan dengan ketepatan pengujian statistik, terutama pada sampel berukuran kecil. Baltagi

(2021) juga menjelaskan bahwa dalam analisis data panel, estimasi tetap dapat dilakukan meskipun residual tidak berdistribusi normal secara sempurna, sepanjang model dan metode estimasi telah disesuaikan dengan karakteristik data. Penelitian ini menggunakan 96 observasi, sedangkan estimasi akhir dilakukan menggunakan Panel EGLS dengan *cross-section weights* untuk mengakomodasi heteroskedastisitas antarperusahaan. Oleh karena itu, model tetap digunakan dengan kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil pengujian signifikansi, sementara ketidaknormalan residual dicatat sebagai bagian dari diagnosis model dan keterbatasan penelitian.

#### **4.3.1.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas diadakan guna mengetahui apakah terdapat korelasi yang terlampau tinggi antarvariabel independen dalam model. Variabel independen dan kontrol yang diuji meliputi CSR, GCG, ROA, dan DER. Model yang baik tidak memiliki korelasi sangat tinggi antarvariabel bebas sebab kaitan yang terlampau kuat bisa mengganggu kemampuan model dalam membedakan pengaruh tiap variabel bagi ETR. Kriteria yang dipergunakan saat penelitian ini ialah nilai korelasi antarvariabel bebas tidak melampaui 0,80. Hasil uji multikolinieritas disajikan lewat Tabel 4.4 (Hair dkk., 2021; Ghazali, 2021).

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>Variabel</b>	<b>CSR</b>	<b>GCG</b>	<b>ROA</b>	<b>DER</b>
CSR	1,000000	0,072166	0,157791	-0,281445
GCG	0,072166	1,000000	-0,159280	0,075325
ROA	0,157791	-0,159280	1,000000	-0,463016
DER	-0,281445	0,075325	-0,463016	1,000000

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwasanya seluruh nilai korelasi antarvariabel independen tidak melampaui 0,80. Nilai korelasi tertinggi terdapat pada hubungan ROA dan DER sebesar -0,463016. Korelasi tersebut masih berada dalam batas yang bisa diterima, sehingga tidak menunjukkan adanya multikolinieritas yang mengganggu model. Hasil ini berarti CSR, GCG, ROA, serta DER bisa dipergunakan secara bersama-sama dalam model regresi tanpa indikasi hubungan yang terlalu kuat antarvariabel bebas. Temuan ini penting karena pengujian hipotesis membutuhkan model yang mampu memisahkan kontribusi masing-masing variabel terhadap ETR (Hair dkk., 2021; Data diolah penulis, 2026).

#### **4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas diadakan guna menilai apakah varians residual dalam model punya sifat konstan atau berbeda antarunit perusahaan. Karena data penelitian berbentuk panel, uji heteroskedastisitas dilaksanakan menggunakan *Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test*. Hipotesis nol dalam pelaksanaan uji ini menyatakan bahwasanya residual bersifat homoskedastik. Bilamana nilai probabilitas tidak melampaui 0,05, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil

pelaksanaan uji heteroskedastisitas disajikan lewat Tabel 4.5 (Ghozali, 2021; Baltagi, 2021).

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji	Nilai	df	Probability	Keputusan
<i>Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test</i>	257,3163	24	0,0000	Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwasanya nilai *Likelihood Ratio* di angka 257,3163 disertai nilai probabilitas 0,0000. Nilai probabilitas tersebut tidak melampaui 0,05, sehingga residual model mengalami heteroskedastisitas pada dimensi *cross-section*. Artinya, variasi residual antarperusahaan tidak sama. Kondisi ini wajar terjadi pada data perusahaan karena setiap perusahaan memiliki ukuran, struktur pendanaan, strategi pelaporan, dan karakteristik operasional yang berbeda. Untuk mengatasi gejala tersebut, estimasi regresi final dilakukan menggunakan metode *Panel EGLS* dengan *cross-section weights*, sehingga hasil akhir lebih sesuai untuk data yang memiliki perbedaan varians antarperusahaan (Baltagi, 2021; Data diolah penulis, 2026).

#### 4.3.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipergunakan untuk menilai apakah residual pada satu periode punya keterkaitan dengan residual pada periode lainnya. Pengujian ini penting karena data penelitian memiliki dimensi waktu 2021-2024. Indikator yang dipakai adalah nilai *Durbin-Watson*. Nilai *Durbin-Watson* yang berada di sekitar

angka 2 memperlihatkan bahwasanya model tidak memiliki gejala autokorelasi yang serius.

Pada output regresi final, nilai *Durbin-Watson* bagian *unweighted statistics* sebesar 2,242341. Nilai tersebut relatif dekat dengan 2, sehingga model tidak menunjukkan masalah autokorelasi yang serius (Ghozali, 2021; Data diolah penulis, 2026).

#### 4.3.2 Analisis Regresi Data Panel

Pengujian regresi diadakan guna menganalisis *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), dengan *Return on Assets* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel kontrol. Estimasi awal dilakukan menggunakan *Panel Least Squares*. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada dimensi *cross-section*, sehingga estimasi akhir dilakukan menggunakan *Panel Estimated Generalized Least Squares* (Panel EGLS) dengan *cross-section weights*. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mengakomodasi perbedaan varians residual antarperusahaan agar hasil estimasi lebih sesuai dengan karakteristik data penelitian. Model regresi menempatkan ETR sebagai variabel dependen, CSR dan GCG sebagai variabel independen, dan ROA dan DER sebagai variabel kontrol sesuai dengan rancangan penelitian (Wooldridge, 2020; Baltagi, 2021). Model regresi yang dipakai saat riset ini adalah sebagaimana di bawah:

$$ETR = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 GCG + \beta_3 ROA + \beta_4 DER + e$$

**Tabel 4.6 Hasil Regresi Final Panel EGLS (Cross-section Weights)**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25,46765	1,033313	24,64661	0,0000
CSR	-2,64173	0,773532	-3,415207	0,0010
GCG	-2,476768	1,579910	-1,567664	0,1204
ROA	-0,078158	0,025203	-3,101158	0,0026
DER	-0,003950	0,004398	-0,898088	0,3715

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Didasarkan Tabel 4.6, persamaan regresi akhir yang didapat yakni sebagaimana di bawah:

$$\text{ETR} = 25,46765 - 2,64173\text{CSR} - 2,476768\text{GCG} - 0,078158\text{ROA} - 0,003950\text{DER} + e$$

Nilai konstanta di angka 25,46765 memperlihatkan bahwasanya bila CSR, GCG, ROA, serta DER berada pada nilai nol, maka ETR secara matematis diperkirakan sebesar 25,46765%. Nilai konstanta tersebut merupakan titik potong dalam persamaan regresi. Interpretasinya perlu dilakukan secara hati-hati karena kondisi seluruh variabel independen dan variabel kontrol bernilai nol belum tentu menggambarkan kondisi aktual perusahaan dalam sampel penelitian.

Koefisien CSR sebesar -2,64173 menunjukkan arah hubungan negatif antara CSR dan ETR. Maknanya, tiap indeks naik sebesar satu satuan diperkirakan membuat turun ETR sejumlah 2,641773 poin persentase dengan asumsi variabel lainnya tetap. Karena indeks CSR berada pada rentang 0 sampai 1, kenaikan indeks CSR sebesar 0,1 diperkirakan menurunkan ETR sebesar 0,2641773 poin persentase. Nilai probabilitas di angka 0,0010 memperlihatkan bahwasanya

pengaruh negatif CSR bagi ETR signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5%.

Koefisien GCG sebesar  $-2,476768$  menunjukkan arah pengaruh negatif antara GCG dan ETR. Maknanya, tiap indeks GCG naik sebesar satu satuan diperkirakan membuat turun ETR sejumlah  $2,476768$  poin persentase dengan asumsi variabel lainnya tetap. Namun, nilai probabilitas di angka  $0,1204$  lebih besar dari  $0,05$ . Dengan demikian, pengaruh negatif GCG terhadap ETR tidak signifikan secara statistik.

Koefisien ROA di angka  $-0,078158$  memperlihatkan arah pengaruh negatif antara ROA dan ETR. Maknanya, kenaikan ROA sebesar satu satuan diperkirakan membuat turun ETR sejumlah  $0,078158$  poin persentase dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai probabilitas di angka  $0,0026$  memperlihatkan bahwasanya ROA memberi pengaruh negatif dan signifikan bagi ETR pada taraf signifikansi 5%.

Koefisien DER di angka  $-0,003950$  memperlihatkan arah pengaruh negatif antara DER dan ETR. Maknanya, tiap DER naik sebesar satu satuan diperkirakan membuat turun ETR sejumlah  $0,003950$  poin persentase disertai asumsi variabel lainnya tetap. Namun, nilai probabilitas di angka  $0,3715$  melampaui  $0,05$ . Sebab demikian, pengaruh negatif DER terhadap ETR tidak signifikan secara statistik.

Secara keseluruhan, seluruh variabel dalam model memiliki arah koefisien negatif terhadap ETR. Namun, hanya CSR dan ROA yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik, sedangkan GCG dan DER tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan bagi ETR pada taraf signifikansi 5%.

### 4.3.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis diadakan guna menentukan apakah variabel dalam model memberi pengaruh bagi ETR secara simultan maupun parsial. Uji F dipergunakan untuk menilai pengaruh CSR, GCG, ROA, dan DER secara bersama-sama terhadap ETR. Koefisien determinasi dipergunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi ETR. Uji t dipakai untuk melihat pengaruh tiap variabel secara parsial bagi ETR (Ghozali, 2021).

#### 4.3.3.1 Uji F

Uji F dipakai guna mengetahui apakah keseluruhan variabel independen dan variabel kontrol dalam model secara bersama-sama berpengaruh bagi ETR. Kriteria pengambilan keputusan ialah nilai probabilitas *F-statistic*. Apabila nilai probabilitas tidak melampaui 0,05, maka model dinyatakan signifikan secara simultan. Hasil uji F dari regresi final disajikan lewat Tabel 4.7 (Ghozali, 2021).

**Tabel 4.7 Hasil Uji F**

Keterangan	Nilai
F-statistic	6,185897
Prob(F-statistic)	0,000190
Keputusan	Model Signifikan secara simultan

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwasanya nilai *F-statistic* di angka 6,185897 disertai nilai *Prob(F-statistic)* di angka 0,000190. Nilai tersebut tidak melampaui 0,05, sehingga CSR, GCG, ROA, dan DER secara simultan memberi pengaruh signifikan bagi ETR. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya model penelitian secara keseluruhan layak digunakan untuk menjelaskan variasi ETR pada perusahaan

subsektor makanan dan minuman dalam sampel. Meskipun tidak semua variabel berpengaruh signifikan secara parsial, hasil pelaksanaan uji simultan memperlihatkan bahwasanya CSR, GCG, ROA, dan DER secara bersama-sama memberi pengaruh yang signifikan bagi variasi ETR perusahaan (Ghozali, 2021; Data diolah penulis, 2026).

#### 4.3.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui sebesar apa kemampuan CSR, GCG, ROA, dan DER dalam menjelaskan variasi ETR. Nilai yang digunakan saat riset ini ialah *Adjusted R-squared* sebab model memiliki lebih dari satu variabel independen. *Adjusted R-squared* lebih tepat digunakan dibandingkan R-squared biasa sebab sudah memperhitungkan jumlah variabel dalam model. Hasil koefisien determinasi diperlihatkan lewat Tabel 4.8 (Ghozali, 2021).

**Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi**

Keterangan	Nilai
<i>R-squared</i>	0,213779
<i>Adjusted R-squared</i>	0,179220
<i>Persentase Adjusted R-squared</i>	17,92%

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwasanya nilai *Adjusted R-squared* di angka 0,179220. Nilai tersebut berarti bahwa CSR, GCG, ROA, dan DER bisa menjelaskan variasi ETR sejumlah 17,92%. Sisa variasi sejumlah 82,08% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Faktor lain yang berkemungkinan memengaruhi ETR antara lain ukuran perusahaan, intensitas

modal, intensitas persediaan, kompensasi rugi fiskal, perbedaan temporer dan permanen, kualitas audit, kebijakan akuntansi, serta pemanfaatan insentif pajak. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa ETR dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga CSR, GCG, ROA, dan DER hanya menjelaskan sebagian dari variasi ETR perusahaan (Christensen dkk., 2022; Drake dkk., 2020).

#### 4.3.3.3 Uji t

Uji t dipakai guna mengetahui pengaruh tiap variabel secara parsial bagi ETR. Variabel dinyatakan memberi pengaruh signifikan bila nilai probabilitas tidak melampaui 0,05, sedangkan arah pengaruh dilihat dari tanda koefisien regresi. Hasil uji t diperlihatkan lewat Tabel 4.9 (Ghozali, 2021).

**Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Arah Koefisien</b>	<b>Prob.</b>	<b>Keputusan Statistik</b>	<b>Kesimpulan</b>
CSR	-2,64173	Negatif	0,0010	Berpengaruh negatif signifikan	H1 ditolak
GCG	-2,476768	Negatif	0,1204	Tidak berpengaruh signifikan	H2 ditolak
ROA	-0,078158	Negatif	0,0026	Berpengaruh negatif signifikan	Variabel kontrol berpengaruh negatif signifikan
DER	-0,003950	Negatif	0,3715	Tidak berpengaruh signifikan	Variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah dengan EViews 13, 2026.

Didasarkan Tabel 4.9, CSR memiliki nilai probabilitas di angka 0,0010, sehingga CSR memberi pengaruh signifikan bagi ETR pada taraf signifikansi 5%. Namun, nilai koefisien CSR di angka -2,64173 menunjukkan arah pengaruh negatif. Sebab demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwasanya CSR berpengaruh positif terhadap ETR ditolak, karena hasil riset menunjukkan pengaruh yang signifikan tetapi arahnya negatif.

GCG memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1204, sehingga GCG tidak memberi pengaruh signifikan bagi ETR. Nilai koefisien GCG di angka -2,476768 memperlihatkan arah pengaruh negatif, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Sebab demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwasanya GCG berpengaruh positif terhadap ETR ditolak.

Variabel kontrol ROA punya nilai probabilitas di angka 0,0026 disertai nilai koefisien di angka -0,078158. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya ROA memberi pengaruh negatif signifikan bagi ETR. Sementara itu, DER memiliki nilai probabilitas di angka 0,3715 disertai nilai koefisien di angka -0,003950, sehingga DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya CSR dan ROA memberi pengaruh negatif dan signifikan bagi ETR, sedangkan GCG dan DER tidak memberi pengaruh signifikan bagi ETR pada taraf signifikansi 5%. Sebab demikian, hipotesis pertama dan hipotesis kedua ditolak, sedangkan ROA sebagai variabel kontrol terbukti memberi pengaruh negatif dan signifikan bagi ETR.

#### 4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Interpretasi hasil dilakukan dengan menghubungkan temuan statistik dengan teori, penelitian terdahulu, dan karakteristik perusahaan subsektor makanan dan minuman. Pembahasan tidak hanya melihat apakah hipotesis diterima atau ditolak, tetapi juga menjelaskan kemungkinan alasan empiris yang membuat suatu variabel berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap ETR. Variabel CSR dan GCG ditempatkan sebagai mekanisme yang berkaitan dengan legitimasi dan tata kelola, sedangkan ROA dan DER dibaca sebagai karakteristik keuangan yang dapat memengaruhi beban pajak efektif. Pembahasan disusun berdasarkan hasil regresi final Panel EGLS dengan *cross-section weights* karena model tersebut telah digunakan untuk menyesuaikan adanya heteroskedastisitas pada dimensi perusahaan. Interpretasi hasil juga dikaitkan dengan teori keagenan, teori legitimasi, serta penelitian terdahulu mengenai ETR, CSR, GCG, ROA, dan DER (Jensen & Meckling, 1976; Drake dkk., 2020; Assidi dkk., 2022; Schwab dkk., 2022).

##### 4.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*

Hasil pengujian memperlihatkan bahwasanya CSR memberi pengaruh negatif signifikan bagi ETR. Nilai koefisien CSR di angka -2,64173 disertai nilai probabilitas 0,0010 memperlihatkan bahwasanya makin tinggi indeks pengungkapan CSR, ETR perusahaan cenderung menurun. Hasil ini tidak mendukung hipotesis awal yang memperkirakan CSR berpengaruh positif terhadap

ETR. Secara teoritis, CSR dalam perspektif legitimasi sering dipahami sebagai mekanisme yang mendorong perusahaan menjaga akuntabilitas dan kehati-hatian terhadap risiko reputasi, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Temuan negatif saat penelitian ini memperlihatkan bahwasanya pengungkapan CSR yang lebih luas tidak selalu diikuti oleh ETR yang lebih tinggi. CSR dalam penelitian ini mengukur tingkat kelengkapan pengungkapan berbasis GRI, bukan kualitas substantif pelaksanaan program CSR. Sebab itu, perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang lebih luas belum tentu punya ETR yang lebih tinggi. (GRI, 2021; Velte, 2021).

Arah pengaruh negatif tersebut dapat dijelaskan dari perbedaan antara pengungkapan CSR dan beban pajak efektif perusahaan. CSR dalam penelitian ini diukur melalui tingkat pengungkapan berbasis GRI, sehingga nilai CSR yang tinggi lebih menunjukkan kelengkapan informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan, bukan secara langsung memperlihatkan bahwasanya perusahaan punya praktik pajak yang lebih konservatif. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih luas tetap dapat melakukan efisiensi pajak sepanjang strategi tersebut berada dalam koridor ketentuan fiskal yang berlaku. Oleh karena itu, ETR yang lebih rendah tidak dapat langsung dimaknai sebagai ketidakpatuhan karena dapat dipengaruhi oleh insentif pajak, perbedaan temporer, perbedaan permanen, dan penyesuaian fiskal yang sah. Dengan demikian, pengaruh negatif CSR terhadap ETR menunjukkan bahwa peningkatan kelengkapan pengungkapan keberlanjutan dapat berkaitan dengan penurunan beban pajak efektif perusahaan. Namun, hubungan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk ketidakpatuhan

karena ETR juga dipengaruhi oleh berbagai faktor akuntansi dan fiskal. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa hubungan CSR atau ESG dengan perilaku pajak tidak selalu konsisten karena dipengaruhi oleh konteks, pengukuran, proksi pajak, karakteristik sampel, dan pendekatan penelitian yang digunakan (Marques dkk., 2024; Mitroulia dkk., 2025).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan CSR dengan perilaku pajak. Noorprasetya dan Prasetya (2023) memperlihatkan bahwasanya CSR memberi pengaruh signifikan bagi *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI. Laurencia dan Indarto (2025) menemukan bahwa CSR berkaitan dengan perilaku pajak perusahaan, sedangkan Fatimah dan Mujiyati (2025) pada subsektor F&B menunjukkan bahwa CSR tidak selalu konsisten ketika diuji bersama indikator tata kelola dan kinerja keuangan. Perbedaan hasil tersebut memperkuat bahwasanya pengaruh CSR terhadap ETR sangat bergantung pada proksi pajak, sektor, periode, dan desain pengukuran CSR. Hasil riset ini memperlihatkan bahwasanya pada perusahaan subsektor makanan dan minuman selama periode 2021-2024, peningkatan pengungkapan CSR berkaitan dengan penurunan ETR. Sebab itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwasanya CSR berpengaruh positif terhadap ETR ditolak. (Nawang Sari, 2022; Laurencia & Indarto, 2025; Fatimah & Mujiyati, 2025).

#### 4.4.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Hasil pengujian memperlihatkan bahwasanya GCG tidak memberi pengaruh signifikan terhadap ETR. Nilai koefisien GCG sebesar -2,476768 disertai nilai probabilitas 0,1204 memperlihatkan bahwasanya GCG tidak memberi pengaruh yang cukup kuat secara statistik terhadap ETR pada taraf signifikansi 5%. GCG dalam penelitian ini diukur sebagai indeks komposit yang terdiri dari komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional. Ketidaksignifikanan ini memperlihatkan bahwasanya keberadaan mekanisme tata kelola secara agregat belum cukup menjelaskan variasi ETR perusahaan. Dalam perspektif teori keagenan, GCG secara konseptual berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal untuk membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan. Hasil studi ini mengindikasikan bahwasanya mekanisme tata kelola formal belum tentu langsung memengaruhi keputusan pajak perusahaan yang tercermin melalui ETR (Jensen & Meckling, 1976; KNKG, 2021).

Ketidaksignifikanan GCG dapat terjadi karena pengukuran komposit menggabungkan beberapa indikator yang masing-masing mungkin memiliki peran berbeda terhadap kebijakan pajak. Komisaris independen, komite audit, juga kepemilikan institusional tidak selalu bekerja dengan intensitas pengawasan yang sama pada setiap perusahaan. Beberapa perusahaan dapat memenuhi struktur tata kelola secara formal, tetapi pengaruh substantifnya terhadap kebijakan pajak belum terlihat secara langsung. Kebijakan pajak juga sering berada pada wilayah teknis

yang dipengaruhi oleh departemen keuangan, konsultan pajak, strategi akuntansi, dan kondisi fiskal perusahaan. Indeks GCG yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan keberadaan dan komposisi mekanisme pengawasan, tetapi belum sepenuhnya menangkap kualitas rapat, independensi nyata, kompetensi anggota komite, atau intensitas pengawasan terhadap strategi perpajakan. Oleh karena itu, pengukuran GCG sebagai indeks komposit lebih tepat dipahami sebagai ukuran struktur tata kelola, bukan sebagai ukuran menyeluruh atas kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan (KNKG, 2021; OJK, 2021).

Hasil ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengaruh GCG terhadap perilaku pajak tidak selalu seragam. Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa salah satu proksi GCG, yaitu komisaris independen, memberi pengaruh signifikan bagi *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak memberi pengaruh signifikan. Fatimah dan Mujiyati (2025) juga menunjukkan bahwa pengaruh indikator GCG pada subsektor makanan dan minuman tidak selalu konsisten ketika diuji bersama CSR dan variabel keuangan. Assidi dkk (2022) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat berperan dalam membatasi praktik *aggressive tax planning*, tetapi efektivitasnya dapat bergantung pada kualitas mekanisme pengawasan dan konteks perusahaan. Temuan penelitian ini tidak sama dengan studi yang mendapati pengaruh signifikan GCG bagi perilaku pajak, tetapi mendukung pandangan bahwa pengaruh tata kelola terhadap ETR dapat bergantung pada indikator, kualitas pelaksanaan, dan konteks perusahaan yang diteliti (Assidi dkk, 2022; Noorprasetya & Prasetya, 2023; Fatimah & Mujiyati, 2025).

#### 4.4.3 Pengaruh *Return on Asset (ROA)* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*

Hasil pelaksanaan uji memperlihatkan bahwasanya ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Nilai koefisien ROA di angka  $-0,078158$  disertai nilai probabilitas  $0,0026$  memperlihatkan bahwasanya semakin tinggi ROA, ETR perusahaan cenderung menurun. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya perusahaan yang lebih bisa menghasilkan laba dari aset tidak selalu memiliki ETR yang lebih tinggi. Arah negatif tersebut dapat memperlihatkan bahwasanya perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi punya kapasitas yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak, memanfaatkan fasilitas fiskal, atau mengelola perbedaan akuntansi dan fiskal secara lebih efektif. ROA sebagai indikator profitabilitas merefleksikan kecakapan perusahaan menghasilkan laba, tetapi beban pajak efektif tidak sebatas ditentukan oleh laba, namun juga oleh koreksi fiskal, insentif, dan strategi perpajakan perusahaan (Ross dkk., 2022; Drake dkk., 2020; Schwab dkk., 2022).

Pengaruh negatif ROA terhadap ETR dapat dibaca melalui teori keagenan. Manajemen perusahaan yang punya tingkat profitabilitas tinggi dapat mempunyai insentif lebih besar untuk mengelola beban pajak karena pajak secara langsung mengurangi laba setelah pajak. Perusahaan yang lebih menguntungkan juga biasanya punya sumber daya lebih baik untuk menyusun strategi fiskal yang efisien, termasuk melalui perencanaan transaksi, pemanfaatan perbedaan temporer, atau pengelolaan biaya yang diperkenankan secara fiskal. Hasil ini tidak berarti bahwa perusahaan profitabel melakukan pelanggaran pajak, melainkan menunjukkan bahwa profitabilitas berkaitan dengan variasi beban pajak efektif. ETR yang rendah

pada perusahaan profitabel dapat muncul dari faktor fiskal yang sah sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku (Jensen & Meckling, 1976; Drake dkk., 2020).

Temuan ini searah dengan penelitian terdahulu yang mendapati bahwasanya profitabilitas dapat memengaruhi ETR karena laba merupakan basis utama pengenaan pajak, sekaligus menjadi area yang dapat mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak. Fatimah dan Mujiyati (2025) pada subsektor makanan dan minuman menunjukkan bahwa kinerja keuangan tertentu memiliki hubungan dengan perilaku pajak. Christensen dkk. (2022) juga menegaskan bahwa variasi ETR perusahaan dapat dipengaruhi oleh mekanisme yang membuat sebagian perusahaan memiliki tarif pajak efektif lebih rendah. Hasil riset ini memperlihatkan bahwasanya ROA relevan digunakan sebagai variabel kontrol karena profitabilitas terbukti memberi pengaruh negatif dan signifikan bagi ETR pada perusahaan subsektor makanan dan minuman selama periode 2021-2024 (Christensen dkk., 2022; Fatimah & Mujiyati, 2025).

#### **4.4.4 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)**

Hasil pelaksanaan uji memperlihatkan bahwasanya DER tidak memberi pengaruh signifikan bagi ETR. Nilai koefisien DER di angka -0,003950 disertai nilai probabilitas 0,3715 memperlihatkan bahwasanya struktur pendanaan berbasis utang tidak punya pengaruh yang cukup kuat bagi ETR pada taraf signifikansi 5%. Arah koefisien DER memang negatif, tetapi pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya tingkat utang perusahaan tidak

secara langsung menjelaskan variasi ETR pada sampel penelitian. DER tetap relevan sebagai variabel kontrol karena secara teoretis utang dapat memengaruhi pajak melalui biaya bunga, tetapi pada data penelitian ini pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk membentuk perbedaan ETR yang signifikan (Ross dkk., 2022; Purba dkk., 2024).

Ketidaksignifikanan DER dapat terjadi karena beban bunga tidak selalu menjadi faktor dominan dalam pembentukan ETR perusahaan subsektor makanan dan minuman. Perusahaan dapat memiliki struktur utang yang berbeda, tetapi dampaknya terhadap pajak efektif bergantung pada besarnya bunga yang dapat dikurangkan, komposisi utang, kebijakan pembiayaan, serta batasan fiskal yang berlaku. Nilai DER yang tinggi tidak selalu berarti perusahaan memperoleh manfaat pajak yang besar, karena beban bunga dan perlakuan fiskalnya harus dilihat lebih rinci. Perusahaan dengan DER rendah juga tetap dapat memiliki ETR rendah karena faktor lain seperti insentif pajak, perbedaan permanen, atau koreksi fiskal. Dengan demikian, struktur pendanaan tidak menjadi determinan utama ETR pada sampel akhir penelitian ini (OECD, 2024; Drake dkk., 2020).

Hasil studi ini tidak sama dengan Laurencia dan Indarto (2025) yang mendapati bahwasanya leverage memberi pengaruh positif bagi *tax avoidance*, sehingga perusahaan dengan tingkat utang lebih besar punya kecenderungan memiliki kecenderungan penghindaran pajak lebih tinggi. Namun, hasil ini masih dapat dijelaskan karena perbedaan sektor, periode, proksi pajak, dan komposisi sampel. Purba dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa leverage relevan dikaji dalam penelitian penghindaran pajak sektor makanan dan minuman, meskipun

pengaruhnya dapat berbeda tergantung pada model dan karakteristik data yang digunakan. Perbedaan hasil tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan sektor, periode, proksi pajak, serta komposisi sampel. Pada penelitian ini, sampel dibatasi pada perusahaan yang punya laba sebelum pajak dan ETR positif selama seluruh periode pengamatan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan variasi karakteristik keuangan dalam sampel menjadi lebih terbatas, sehingga DER belum mampu memperlihatkan pengaruh yang signifikan bagi ETR. Temuan ini memberi penegasan bahwasanya pengaruh leverage terhadap ETR tidak selalu sama pada setiap konteks penelitian (Guska & Kaesang, 2024; Laurencia & Indarto, 2025).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Riset ini diadakan guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Penelitian ini menggunakan ROA dan DER sebagai variabel kontrol. Setelah proses penyaringan data, sampel akhir terdiri atas 24 perusahaan selama empat tahun pengamatan, sehingga diperoleh 96 observasi dengan struktur *balanced panel*. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, simpulan penelitian ini ialah sebagaimana di bawah.

1. CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Perihal ini diperlihatkan oleh nilai koefisien CSR di angka -2,64173 dengan nilai probabilitas 0,0010. Hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya semakin tinggi pengungkapan CSR berbasis *GRI Disclosure Index*, ETR perusahaan cenderung menurun. Sebab demikian, hipotesis yang menyatakan bahwasanya CSR berpengaruh positif terhadap ETR tidak didukung oleh hasil riset ini.
2. GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Perihal ini diperlihatkan lewat nilai koefisien GCG di angka -2,476768 disertai nilai probabilitas 0,1204. Hasil tersebut menunjukkan bahwa GCG yang diukur melalui indeks komposit komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional belum terbukti memengaruhi ETR perusahaan. Dengan demikian, hipotesis

yang menyatakan bahwasanya GCG berpengaruh positif terhadap ETR tidak didukung oleh hasil penelitian ini.

3. ROA sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR disertai nilai probabilitas di angka 0,0026 dan koefisien di angka -0,078158. Sementara itu, DER sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR disertai nilai probabilitas di angka 0,3715. Hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya profitabilitas berkaitan dengan variasi ETR, sedangkan struktur pendanaan berbasis utang belum terbukti memengaruhi ETR pada sampel penelitian ini.

Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya CSR dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR, sedangkan GCG dan DER tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ETR. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya ETR dapat terpengaruh oleh faktor nonkeuangan maupun karakteristik keuangan perusahaan. Oleh karena itu, ETR perlu dipahami sebagai ukuran beban pajak efektif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan bukan sebagai ukuran tunggal untuk menyatakan perusahaan patuh ataupun tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nilai *Adjusted R-squared* saat riset ini sejumlah 17,92%, sehingga masih terdapat variasi ETR yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Faktor lain contohnya ukuran perusahaan, intensitas modal, intensitas persediaan, kualitas audit, insentif pajak, kompensasi kerugian fiskal, serta perbedaan temporer dan permanen belum diikutkan dalam model penelitian ini.
2. GCG saat riset ini diukur memakai indeks komposit yang dibentuk dari komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional. Penggunaan indeks komposit bisa memberikan gambaran umum mengenai tata kelola perusahaan, tetapi belum dapat menunjukkan pengaruh tiap indikator GCG secara terpisah terhadap ETR. Dengan demikian, studi ini belum dapat menjelaskan apakah hubungan GCG terhadap ETR lebih banyak dipengaruhi oleh komisaris independen, komite audit, atau kepemilikan institusional.

### **5.2.2 Saran**

Didasarkan keterbatasan riset yang sudah dijelaskan, saran yang bisa diberikan ialah sebagaimana di bawah.

1. Penelitian setelahnya disarankan agar menambah variabel lain yang berkemungkinan memberi pengaruh bagi ETR, contohnya ukuran perusahaan, intensitas modal, intensitas persediaan, kualitas audit, insentif pajak, kompensasi rugi fiskal, serta perbedaan temporer dan permanen.

Penambahan variabel tersebut harapannya bisa meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi ETR.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji indikator GCG secara terpisah, seperti komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional. Pemisahan indikator tersebut dapat membantu menjelaskan mekanisme tata kelola mana yang lebih berperan dalam memengaruhi ETR perusahaan.

### **5.3 Implikasi**

#### **5.3.1 Implikasi Teoritis**

Hasil studi ini memberikan implikasi teoritis terhadap pengembangan kajian mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai variabel dependen.

1. Hasil studi ini memperlihatkan bahwasanya CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pengungkapan CSR sebagai mekanisme legitimasi eksternal tidak selalu diikuti oleh ETR yang lebih tinggi. Sebab itu, teori legitimasi dalam konteks studi ini perlu dipahami secara hati-hati karena tingkat pengungkapan CSR yang lebih luas tidak secara langsung mencerminkan besarnya beban pajak efektif perusahaan. CSR dalam penelitian ini mengukur kelengkapan pengungkapan berdasarkan GRI, sedangkan ETR dipengaruhi oleh berbagai faktor akuntansi dan fiskal.

2. Hasil studi ini turut memperlihatkan bahwasanya GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Temuan ini memberi implikasi terhadap teori keagenan bahwasanya keberadaan struktur tata kelola secara formal, seperti komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional, belum tentu bisa menjelaskan variasi ETR perusahaan. Efektivitas GCG tidak sebatas ditentukan oleh keberadaan struktur tata kelola, namun turut oleh kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang belum sepenuhnya tercakup dalam indeks komposit penelitian ini.

### **5.3.2 Implikasi Praktis**

1. Bagi perusahaan, hasil riset ini memperlihatkan bahwasanya pengungkapan CSR perlu disertai dengan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan perpajakan. Namun, pengaruh negatif CSR terhadap ETR tidak dapat langsung diartikan sebagai ketidakpatuhan pajak karena ETR juga dapat dipengaruhi oleh insentif pajak, perbedaan akuntansi dan fiskal, serta faktor lain yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Bagi manajemen perusahaan, hasil riset ini bisa menjadi bahan evaluasi agar mekanisme tata kelola dijalankan secara substantif dan tidak hanya memenuhi ketentuan formal. Komisaris independen, komite audit, juga pemegang saham institusional perlu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, termasuk terhadap pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan kebijakan perpajakan perusahaan.

3. Bagi investor, hasil studi bisa dipergunakan sebagai informasi tambahan dalam menilai pengungkapan CSR, struktur tata kelola, dan tingkat ETR perusahaan. Investor perlu memahami bahwa tingginya pengungkapan CSR tidak secara otomatis diikuti oleh ETR yang lebih tinggi, sedangkan keberadaan mekanisme GCG secara formal juga belum tentu mencerminkan kualitas pelaksanaannya secara menyeluruh.
4. Bagi pemerintah serta otoritas terkait, hasil riset bisa menjadi informasi tambahan saat memahami variasi ETR pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Informasi mengenai CSR, GCG, profitabilitas, dan struktur pendanaan dapat digunakan sebagai bahan analisis awal. Namun, penilaian terhadap kewajaran dan kepatuhan perpajakan tetap memerlukan pemeriksaan yang lebih komprehensif karena ETR dipengaruhi oleh berbagai faktor akuntansi dan fiskal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Agresivitas pajak: Sebuah meta analisis dalam perspektif agency theory. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52–62. <https://doi.org/10.20473/tijab.V4.I1.2020.52-62>
- Assidi, S., Farooque, O. A., & Albitar, K. (2022). The nexus between aggressive tax planning and earnings management in different political systems and the moderating role of corporate governance. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 14(4), 344–361.
- Atrill, P., & McLaney, E. (2023). *Accounting and finance for non-specialists* (12th ed.). Pearson.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.
- Christensen, D. M., Kenchington, D. G., & Laux, R. C. (2022). How do most low ETR firms avoid paying taxes? *Review of Accounting Studies*, 27(2), 570–606. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09614-8>
- Development, O. for E. C. and. (2024). *Tax administration 2024: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2d5fba9c-en>
- Dewi, M. A., & Nustini, Y. (2024). Corporate social responsibility, leverage, capital intensity, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak: Good corporate governance sebagai pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 51–74.
- Drake, K. D., Hamilton, R., & Lusch, S. J. (2020). Are declining effective tax rates indicative of tax avoidance? Insight from effective tax rate reconciliations. *Journal of Accounting and Economics*, 70(1), 101317. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101317>
- Fatimah, S. N., & Mujiyati. (2025). Pengaruh good corporate governance (GCG), corporate social responsibility (CSR), profitabilitas, dan sales growth terhadap tax avoidance (Studi pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023). In *Repositori Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fund, I. M. (2024). *Tax Administration: Essential Analytics for Compliance Risk Management*. International Monetary Fund.

- Gaertner, F. B., Glover, B., & Levine, O. (2022). *A re-examination of firm size and taxes*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance, K. N. K. (2021). *Pedoman umum governansi korporat Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2021). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Indonesia, B. E. (2026). *Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan emiten*. <https://www.idx.co.id>
- Indonesia, K. K. R. (2024). *Informasi APBN 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, K. P. R. (2024). Kontribusi meningkat, investasi dan ekspor industri mamin semakin lezat (Siaran Pers). In *Kementerian Perindustrian RI*. <https://kemenperin.go.id>
- Initiative, G. R. (2022a). *GRI 13: Agriculture, Aquaculture and Fishing Sectors 2022*. Global Reporting Initiative.
- Initiative, G. R. (2022b). *Item 06 – GRI Sector Standards Project for Food and Beverages: Project proposal*. Global Reporting Initiative.
- Initiative, G. R. (2023). *GRI standards: Consolidated set of the GRI standards*. Global Reporting Initiative.
- Initiative, G. R. (2024). *Mainstreaming impact reporting: Annual report 2023*. Global Reporting Initiative.
- Investopedia. (2025). Fast-moving consumer goods (FMCG). In *Investopedia*. <https://www.investopedia.com>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jony. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi effective tax rate pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 4(2), 76–90.
- Kuangan, O. J. (2021). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor*

16/SEOJK.04/2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan.

KPMG. (2022a). *Survey of Sustainability Reporting 2022: Big shifts, small steps*. KPMG International.

KPMG. (2022b). *Tax Reimagined 2022: Perspectives from the C-suite*. KPMG LLP.

L.P., B. (2026). *Bloomberg Terminal*. Bloomberg Professional Services.

Lahtifi, U. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, audit committee dan size terhadap effective tax rate (Studi empiris pada perusahaan industri barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020). In *Repository UIN Suska Riau*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Laurencia, L. S., & Indarto, S. L. (2025). Determinasi good corporate governance, CSR, capital intensity, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan terdaftar di BEI. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(1), 133–142. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i1.707>

Lubis, N. A. (2022). Pengaruh leverage, firm size, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2020). In *UIN Suska Repository*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Makanan, B. P. O. dan. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang registrasi pangan olahan*. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Marques, M., Montenegro, T. M., & Brás, F. A. (2024). Tax avoidance and corporate social responsibility: A meta-analysis. *Journal of the American Taxation Association*, 46(1), 137–156. <https://doi.org/10.2308/JATA-2022-026>

Mitroulia, M., Chytis, E., Kitsantas, T., Skordoulis, M., & Kalantonis, P. (2025). ESG strategy and tax avoidance: Insights from a meta-regression analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(9), 503. <https://doi.org/10.3390/jrfm18090503>

Noorprasetya, Y., & Prasetya, F. (2023). Pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019–2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–15.

- Pajak, D. J. (2024). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (2023).
- Purba, P. M., Marjuniarti, F., Samosir, H. D., & Sumiok, C. (2024). Penghindaran pajak sektor makanan dan minuman di Indonesia: Profitabilitas, likuiditas dan leverage. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 825–837.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., & Jordan, B. D. (2022). *Corporate finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Saragih, A. E., & Halawa, B. B. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 8–23.
- Schwab, C. M., Stomberg, B., & Xia, J. (2022). What determines effective tax rates? The relative influence of tax and other factors. *Contemporary Accounting Research*, 39(1), 459–497.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 (2021).
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning.
- Yashilva, W. (2024). 82,4% sumber pendapatan negara berasal dari pajak. In *GoodStats Data*. <https://data.goodstats.id>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Sampel Penelitian

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	BEER	Jobubu Jarum Minahasa Tbk
3	BOBA	Formosa Ingredient Factory Tbk
4	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
6	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
7	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
8	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk
9	DLTA	Delta Djakarta Tbk
10	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
11	GULA	Aman Agrindo Tbk
12	IBOS	Indo Boga Sukses Tbk
13	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
15	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
16	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
17	MYOR	Mayora Indah Tbk
18	NASI	Wahana Inti Makmur Tbk
19	SKLT	Sekar Laut Tbk
20	STTP	Siantar Top Tbk
21	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
22	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
23	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk
24	YUPI	Yupi Indo Jelly Gum Tbk

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2026.

**Lampiran 2 Tabulasi Data**

<b>Tahun</b>	<b>Kode Perusahaan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>ETR</b>	<b>CSR</b>	<b>GCG</b>	<b>ROA</b>	<b>DER</b>
2021	ADES	Akasha Wira Intl	21,3333	0,5556	0,3148	23,4883	0,4112
2022	ADES	Akasha Wira Intl	21,3944	0,5278	0,3149	24,7465	0,1807
2023	ADES	Akasha Wira Intl	21,4163	0,5556	0,3166	21,2181	0,0394
2024	ADES	Akasha Wira Intl	21,0205	0,5556	0,3149	22,0561	0,0066
2021	BEER	Jobubu Jarum Min	21,9574	0,2778	0,5047	24,6994	8,3382
2022	BEER	Jobubu Jarum Min	23,0551	0,3333	0,5045	23,4544	19,4269
2023	BEER	Jobubu Jarum Min	23,1832	0,5833	0,5046	10,2211	4,2395
2024	BEER	Jobubu Jarum Min	23,3578	0,6111	0,3409	0,7106	5,8331
2021	BOBA	Formosa Ingredie	21,7852	0,6389	0,3172	17,1254	0,1981
2022	BOBA	Formosa Ingredie	21,7515	0,6944	0,502	6,8943	0,6002
2023	BOBA	Formosa Ingredie	21,5553	0,6944	0,3168	8,8065	0,3203
2024	BOBA	Formosa Ingredie	21,643	0,6944	0,3168	8,9117	0,1503
2021	BUDI	Budi Starch & Sw	19,5165	0,4444	0,4617	2,7965	79,9536
2022	BUDI	Budi Starch & Sw	19,793	0,4444	0,4707	2,8851	86,6147
2023	BUDI	Budi Starch & Sw	19,4555	0,4444	0,4709	3,1009	82,0139
2024	BUDI	Budi Starch & Sw	20,1713	0,4444	0,471	1,725	104,7765
2021	CAMP	Campina Ice Crea	20,6702	0,5556	0,3159	8,8915	0,12
2022	CAMP	Campina Ice Crea	21,2176	0,6667	0,5009	10,9191	0,14

<b>Tah un</b>	<b>Kode Perusa haan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>ETR</b>	<b>CSR</b>	<b>GCG</b>	<b>ROA</b>	<b>DER</b>
2023	CAMP	Campina Ice Crea	20,6947	0,6944	0,501	11,7796	0,14
2024	CAMP	Campina Ice Crea	21,5535	0,6944	0,5044	8,9424	0,16
2021	CEKA	Wilmar Cahaya In	20,8466	0,8611	0,3382	11,4622	0,22
2022	CEKA	Wilmar Cahaya In	22,0536	0,8611	0,3382	12,923	0,11
2023	CEKA	Wilmar Cahaya In	21,5685	0,8611	0,5041	8,5039	0,15
2024	CEKA	Wilmar Cahaya In	21,2735	0,8611	0,5044	15,1883	0,25
2021	CLEO	Sariguna Primati	21,5468	0,4167	0,3165	13,2101	21,7105
2022	CLEO	Sariguna Primati	21,9671	0,4444	0,3158	11,9718	32,1815
2023	CLEO	Sariguna Primati	21,3766	0,4444	0,3183	14,9652	34,612
2024	CLEO	Sariguna Primati	21,6289	0,4444	0,3182	18,7578	23,4686
2021	CMRY	Cisarua Mountain	22,2315	0,5	0,315	23,6212	0,8883
2022	CMRY	Cisarua Mountain	21,0118	0,6667	0,3157	17,9341	0,6571
2023	CMRY	Cisarua Mountain	20,4578	0,6667	0,4826	18,7145	0,1835
2024	CMRY	Cisarua Mountain	20,2314	0,6111	0,4826	19,9409	0,1931
2021	DLTA	Delta Djakarta	21,9512	0,7778	0,4387	14,8403	0,3
2022	DLTA	Delta Djakarta	21,8026	0,7778	0,5127	17,6007	0,31
2023	DLTA	Delta Djakarta	20,5147	0,7778	0,5142	15,831	0,29
2024	DLTA	Delta Djakarta	21,4989	0,7778	0,4434	12,4011	0,9589
2021	GOOD	Garudafood Putra	22,1316	0,6944	0,389	6,323	73,6682

<b>Tah un</b>	<b>Kode Perusa haan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>ETR</b>	<b>CSR</b>	<b>GCG</b>	<b>ROA</b>	<b>DER</b>
2022	GOOD	Garudafood Putra	22,6232	0,7222	0,3491	6,0339	69,2081
2023	GOOD	Garudafood Putra	23,1859	0,7222	0,3157	7,8673	48,9851
2024	GOOD	Garudafood Putra	19,9894	0,8611	0,3156	7,8751	50,4994
2021	GULA	Aman Agrindo Tbk	22,1003	0,0278	0,5033	5,7614	42,8315
2022	GULA	Aman Agrindo Tbk	22,2046	0,2778	0,5027	0,9446	32,4647
2023	GULA	Aman Agrindo Tbk	22,2035	0,3889	0,5059	1,5552	46,5454
2024	GULA	Aman Agrindo Tbk	24,8408	0,3611	0,5089	0,6584	46,8433
2021	IBOS	Indo Boga Sukses	34,81	0,3333	0,3195	1,9677	12,4404
2022	IBOS	Indo Boga Sukses	32,36	0,4722	0,3186	2,4733	6,404
2023	IBOS	Indo Boga Sukses	31,9376	0,4722	0,3184	1,7706	6,8646
2024	IBOS	Indo Boga Sukses	31,7334	0,4722	0,3179	0,7198	6,0114
2021	ICBP	Indofood Cbp Suk	20,4843	0,7222	0,5192	5,7742	76,2824
2022	ICBP	Indofood Cbp Suk	23,9614	0,8611	0,3385	3,9314	80,0329
2023	ICBP	Indofood Cbp Suk	26,0345	0,8611	0,4161	5,9603	70,8192
2024	ICBP	Indofood Cbp Suk	23,3575	0,8611	0,4236	5,7718	68,0389
2021	INDF	Indofood Sukses	22,4932	0,3333	0,4083	4,4755	71,3016
2022	INDF	Indofood Sukses	25,3775	0,3333	0,42	3,5357	70,7615
2023	INDF	Indofood Sukses	26,3948	0,3333	0,4171	4,4395	64,3933
2024	INDF	Indofood Sukses	23,2532	0,3333	0,4281	4,451	65,1661

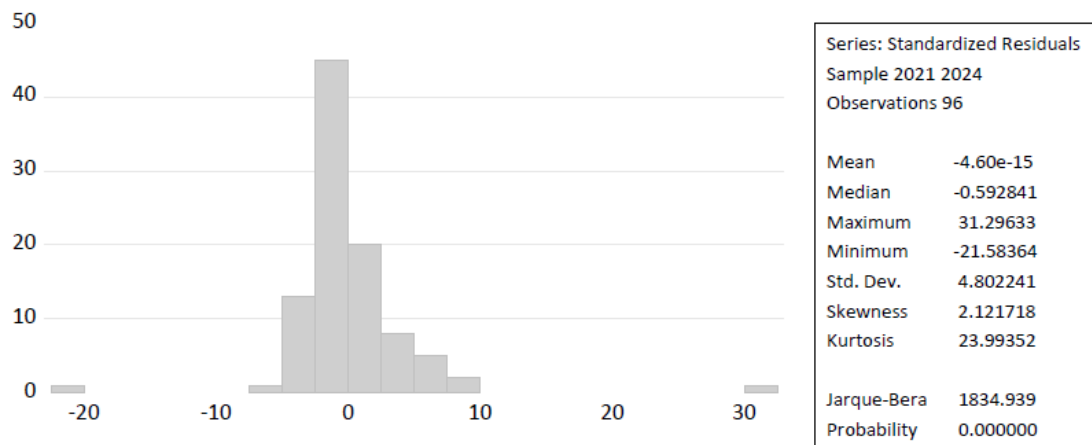
<b>Tah un</b>	<b>Kode Perusa haan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>ETR</b>	<b>CSR</b>	<b>GCG</b>	<b>ROA</b>	<b>DER</b>
2021	KEJU	Mulia Boga Raya	21,0025	0,5278	0,3182	20,062	2,1655
2022	KEJU	Mulia Boga Raya	21,9557	0,7222	0,3193	14,4205	0,22
2023	KEJU	Mulia Boga Raya	21,983	0,7222	0,3193	9,5165	0,23
2024	KEJU	Mulia Boga Raya	21,0305	0,7222	0,3193	16,298	0,32
2021	MLBI	Multi Bintang In	24,1439	0,7778	0,4116	22,8386	39,9173
2022	MLBI	Multi Bintang In	25,799	0,7778	0,4121	29,3739	41,0981
2023	MLBI	Multi Bintang In	23,6995	0,7778	0,4007	31,4417	27,9621
2024	MLBI	Multi Bintang In	21,1115	0,7778	0,4014	33,3487	17,5345
2021	MYOR	Mayora Indah	21,8499	0,6667	0,416	5,9786	45,193
2022	MYOR	Mayora Indah	21,3879	0,7222	0,4129	9,2062	43,0799
2023	MYOR	Mayora Indah	20,7353	0,7222	0,414	13,8421	27,9243
2024	MYOR	Mayora Indah	20,9587	0,7222	0,416	11,1956	47,6449
2021	NASI	Wahana Inti Makm	31,27	0,6667	0,5016	1,1911	8,183
2022	NASI	Wahana Inti Makm	26,2529	0,6944	0,5015	1,4961	11,7502
2023	NASI	Wahana Inti Makm	55,1415	0,6944	0,5014	0,5017	18,5878
2024	NASI	Wahana Inti Makm	1,9589	0,6944	0,5014	0,1864	34,7342
2021	SKLT	Sekar Laut Tbk	16,9095	0,6389	0,6481	10,1654	21,4146
2022	SKLT	Sekar Laut Tbk	19,0116	0,6389	0,4382	7,8187	23,5887
2023	SKLT	Sekar Laut Tbk	19,5934	0,6389	0,4382	6,7227	20,2763

<b>Tahun</b>	<b>Kode Perusahaan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>ETR</b>	<b>CSR</b>	<b>GCG</b>	<b>ROA</b>	<b>DER</b>
2024	SKLT	Sekar Laut Tbk	21,3901	0,6389	0,3194	7,8229	24,7079
2021	STTP	Siantar Top	19,2913	0,7222	0,503	16,7613	0,1002
2022	STTP	Siantar Top	17,47	0,7222	0,503	14,6764	0,1309
2023	STTP	Siantar Top	16,764	0,7222	0,503	18,2208	0,1686
2024	STTP	Siantar Top	12,8951	0,7222	0,503	21,4683	0,1873
2021	TBLA	Tunas Baru Lamp	22,579	0,0833	0,4494	3,9231	149,9565
2022	TBLA	Tunas Baru Lamp	21,4519	0,5278	0,4626	3,5779	156,4006
2023	TBLA	Tunas Baru Lamp	22,0971	0,5278	0,4779	2,467	159,502
2024	TBLA	Tunas Baru Lamp	22,4501	0,5278	0,4779	2,6097	175,2288
2021	TGKA	Tigaraksa Satria	20,8924	0,6944	0,7065	14,2212	2,5829
2022	TGKA	Tigaraksa Satria	20,9356	0,6944	0,7029	12,6109	2,5048
2023	TGKA	Tigaraksa Satria	24,9212	0,6944	0,5347	10,4526	7,3898
2024	TGKA	Tigaraksa Satria	18,4757	0,6667	0,5126	8,9251	9,9268
2021	ULTJ	Ultrajaya Milk	17,1952	0,6111	0,4991	15,7371	29,6171
2022	ULTJ	Ultrajaya Milk	25,0979	0,6111	0,6159	12,9983	10,4904
2023	ULTJ	Ultrajaya Milk	21,3048	0,6111	0,4295	15,6938	0,4621
2024	ULTJ	Ultrajaya Milk	23,4277	0,6111	0,6159	14,2208	0,5096
2021	YUPI	Yupi Indo Jelly	23,4531	0,3056	0,3195	24,2	15,958
2022	YUPI	Yupi Indo Jelly	22,4077	0,3056	0,3195	21,9772	9,066
2023	YUPI	Yupi Indo Jelly	21,5294	0,3333	0,3195	23,8176	3,6769
2024	YUPI	Yupi Indo Jelly	21,0877	0,7222	0,3195	23,693	0,0192

### Lampiran 3 Hasil Uji Analisis Statistika Deskriptif

	ETR	CSR	GCG	ROA	DER
Mean	22.32162	0.600694	0.426510	11.55425	28.23041
Median	21.59870	0.652778	0.425859	10.33685	10.20860
Maximum	55.14150	0.861111	0.706515	33.34870	175.2288
Minimum	1.958900	0.027778	0.314815	0.186400	0.006600
Std. Dev.	5.071380	0.178309	0.094851	8.011703	38.60926
Skewness	2.507877	-0.788076	0.515728	0.530159	1.880553
Kurtosis	22.55130	3.288772	2.961971	2.505549	6.588200
Jarque-Bera	1629.645	10.27058	4.261389	5.475028	108.0844
Probability	0.000000	0.005885	0.118755	0.064731	0.000000
Sum	2142.876	57.66667	40.94493	1109.208	2710.120
Sum Sq. Dev.	2443.295	3.020448	0.854691	6097.801	141614.1
Observations	96	96	96	96	96

### Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas



### Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas

#### Correlation

	CSR	GCG	ROA	DER
CSR	1.000000	0.072166	0.157791	-0.281445
GCG	0.072166	1.000000	-0.159280	0.075325
ROA	0.157791	-0.159280	1.000000	-0.463016
DER	-0.281445	0.075325	-0.463016	1.000000

Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: ETR C CSR GCG ROA DER

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	257.3163	24	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-286.3474	91
Unrestricted LogL	-157.6893	91

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: ETR

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 05/15/26 Time: 15:40

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 24

Total panel (balanced) observations: 96

Iterate weights to convergence

Convergence achieved after 12 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.76799	0.463514	49.12040	0.0000
CSR	-1.014979	0.467944	-2.169017	0.0327
GCG	-0.337773	0.865824	-0.390118	0.6974
ROA	-0.034584	0.010307	-3.355447	0.0012
DER	0.000187	0.001824	0.102267	0.9188

Weighted Statistics

R-squared	0.226174	Mean dependent var	161.1304
Adjusted R-squared	0.192159	S.D. dependent var	173.0584
S.E. of regression	5.154505	Akaike info criterion	3.389359
Sum squared resid	2417.772	Schwarz criterion	3.522919
Log likelihood	-157.6893	Hannan-Quinn criter.	3.443347
F-statistic	6.649360	Durbin-Watson stat	1.510730
Prob(F-statistic)	0.000097		

Unweighted Statistics

R-squared	0.010445	Mean dependent var	22.32162
Sum squared resid	2417.774	Durbin-Watson stat	2.145659

Lampiran 7 Hasil Regresi Awal Panel Least Squares

Dependent Variable: ETR Method: Panel Least Squares Date: 05/15/26 Time: 15:33 Sample: 2021 2024 Periods included: 4 Cross-sections included: 24 Total panel (balanced) observations: 96				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.50672	3.127640	9.753909	0.0000
CSR	-3.038943	2.959521	-1.026836	0.3072
GCG	-8.040297	5.404887	-1.487598	0.1403
ROA	-0.198351	0.071683	-2.767074	0.0069
DER	-0.022620	0.015151	-1.492911	0.1389
R-squared	0.103324	Mean dependent var	22.32162	
Adjusted R-squared	0.063909	S.D. dependent var	5.071380	
S.E. of regression	4.906650	Akaike info criterion	6.069738	
Sum squared resid	2190.845	Schwarz criterion	6.203298	
Log likelihood	-286.3474	Hannan-Quinn criter.	6.123725	
F-statistic	2.621472	Durbin-Watson stat	2.365003	
Prob(F-statistic)	0.039893			

Lampiran 8 Hasil Regresi Final Panel EGLS Cross-section Weights

Dependent Variable: ETR Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 05/15/26 Time: 15:43 Sample: 2021 2024 Periods included: 4 Cross-sections included: 24 Total panel (balanced) observations: 96 Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.46765	1.033313	24.64661	0.0000
CSR	-2.641773	0.773532	-3.415207	0.0010
GCG	-2.476768	1.579910	-1.567664	0.1204
ROA	-0.078158	0.025203	-3.101158	0.0026
DER	-0.003950	0.004398	-0.898088	0.3715
Weighted Statistics				
R-squared	0.213779	Mean dependent var	67.21667	
Adjusted R-squared	0.179220	S.D. dependent var	43.22525	
S.E. of regression	4.045281	Sum squared resid	1489.151	
F-statistic	6.185897	Durbin-Watson stat	1.240217	
Prob(F-statistic)	0.000190			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.054882	Mean dependent var	22.32162	
Sum squared resid	2309.202	Durbin-Watson stat	2.242341	